



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2024. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 20 Januari 2025
Direktur Pengawasan Sumber
Daya Kelautan



Sumono Darwinto

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 yang tertuang dalam 5 sasaran kinerja dan 17 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (Nilai)
2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)
3. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan (%)
5. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)
6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)
7. Presentase penyelesaian sengketa dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (%)
8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa(%)
9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)
10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDK (nilai)
11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (inovasi)
12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK (%)
13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDK (indeks)
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)
15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDK
16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDK
19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDK (%)
20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDK (%)
21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK

Pada tahun 2024, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Keduapuluh satu

indikator kinerja selanjutnya diukur melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dan diperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,59. Nilai ini mengindikasikan kinerja Direktorat PSDK termasuk dalam kategori istimewa.

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2024 adalah Rp 16.701.293.000 namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 12.701.293.000,-. Sedangkan realisasi anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp12.693.380.969,- sebesar 99,94%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
EXCUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan	3
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	6
B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024	11
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran	51
D. Efisiensi	52
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	4
Gambar 2. Dashboard Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024	11
Gambar 3. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Bertanggung Jawab Tahun 2020 s.d 2024....	15
Gambar 4. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan Tahun 2020 s.d 2024	18
Gambar 5. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Tahun 2020 s.d 2024	21
Gambar 6. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Hasil Tindak Lanjut pada Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha	23
Gambar 7. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan SDK yang Mendapat Atensi Pimpinan Tahun 2020 s.d 2024	25
Gambar 8. Grafik perbandingan nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan tahun 2020 s.d 2024.....	27
Gambar 9. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2020 s.d 2024	29
Gambar 10. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha atas Penyelesaian Sengketa Tahun 2020 s.d 2024.....	31
Gambar 11. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024	32
Gambar 12. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024	34
Gambar 13. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Inovasi yang dihasilkan Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024	36
Gambar 14. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Dit. PSDK Tahun 2020 s.d 2024	38
Gambar 15. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN	

Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024.....	39
Gambar 16. Grafik Perbandingan Target dan Capaian INDEKS PROFESIONALITAS ASN Lingkup Direktorat PSDK Tahun 2020 - 2024.....	40
Gambar 17. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024.....	41
Gambar 18. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat PSDK Tahun 2020 - 2024.....	41
Gambar 19. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal PSDK	42
Gambar 20. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024	43
Gambar 21. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Tahun 2024.....	44
Gambar 22. Grafik Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Dit. PSDK yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Tahun 2020 s.d 2024	44
Gambar 23. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK Tahun 2020 s.d 2024	45
Gambar 24. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024	46
Gambar 25. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Presentase unit kerja yang penerapan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar lingkup Dit. PSDK Tahun 2020 s.d 2024	47
Gambar 26. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal PSDK Tahun 2024	48
Gambar 27. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024	49
Gambar 28. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024.....	50
Gambar 29. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024.....	7
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024.....	9
Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024	11
Tabel 4. Matriks Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Kegiatan Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya kelautan yang efektif...	13
Tabel 5. Matriks Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Bertanggung Jawab Tahun 2024	14
Tabel 6. Tabel Perbandingan Target, Capaian dan Persentase Capaian Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Bertanggung Jawab Tahun 2020 s.d 2024	15
Tabel 7. Matriks Perbandingan Capaian Nilai Pemahaman Masyarakat Tahun 2024 antara Dit. PSDP, Dit. PSDK dan Dit. PP	16
Tabel 8. Matriks Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Kegiatan Data dan Informasi Intelijen Kelautan.....	16
Tabel 9. Matriks Perbandingan Capaian Nilai Pemahaman Masyarakat Tahun 2024 antara Dit. PSDP dan Dit. PSDK.....	18
Tabel 10. Matriks Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan.....	19
Tabel 11. Matriks Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Diverifikasi dengan Nilai Verifikasi	20
Tabel 12. Tabel Perbandingan Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	22
Tabel 13. Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan.....	22
Tabel 14. Tabel Perbandingan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan Direktorat PSDK dengan Direktorat PSDP.....	23
Tabel 15. Tabel perbandingan capaian nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional Direktorat PSDK dengan Direktorat PSDP	25
Tabel 16. Matriks Nilai Tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan di	

Pemerintah Provinsi Tahun 2024.....	26
Tabel 17. Matriks Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Direktorat PSDK dengan Direktorat PSDP Tahun 2024	27
Tabel 18. Matriks Perhitungan Capaian Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	28
Tabel 19. Matriks Perhitungan Realisasi Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha atas Penyelesaian Sengketa	29
Tabel 20. Matriks Perhitungan Capaian Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha atas Penyelesaian Sengketa	30
Tabel 20. Matriks Perhitungan Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan SDK	32
Tabel 22. Matriks Perbandingan Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan SDK Direktorat PSDK dengan Direktorat PSDP Tahun 2024.....	33
Tabel 23. Matriks Rekapitulasi Nilai Posttest Kegiatan Bimtek Lingkup Direktorat PSDK Tahun 2024.....	33
Tabel 24. Matriks Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Setditjen PSDKP, Dit. POA, Dit. PSDK, Dit. PSDP, dan Dit. PP	35
Tabel 25. Matriks Perbandingan Capaian Inovasi yang dihasilkan Setditjen PSDKP, Dit. POA, Dit. PSDK, Dit. PSDP, dan Dit. PP Tahun 2024	36
Tabel 26. Matriks Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Kegiatan Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	37
Tabel 27. Matriks Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Dit. PSDK Tahun 2024.....	38
Tabel 28. Matriks Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan SDK.....	42
Tabel 29. Matriks Perhitungan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ..	43
Tabel 30. Matriks perbandingan presentase unit kerja yang penerapan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	47
Tabel 31. Matrik Realisasi Anggaran Direktorat PSDK Tahun 2024	51
Tabel 32. Matriks Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.400.000 km² dan panjang garis pantai kira-kira 108.000 km (KKP, 2024), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 76.395 miliar untuk harga konstan dan Rp. 555.04,20 miliar untuk harga berlaku pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,57 persen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 7,24 persen (KKP, 2024). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumber daya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024, dilaksanakan oleh Direktorat PSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Untuk mewujudkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2022 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PSDK atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai

masuk dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode tahun 2024.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Isu aktual dalam pemanfaatan sumber daya kelautan tahun 2024 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
3. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
4. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor;
6. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
7. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
8. Penambangan pasir laut secara ilegal;
9. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
10. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing.

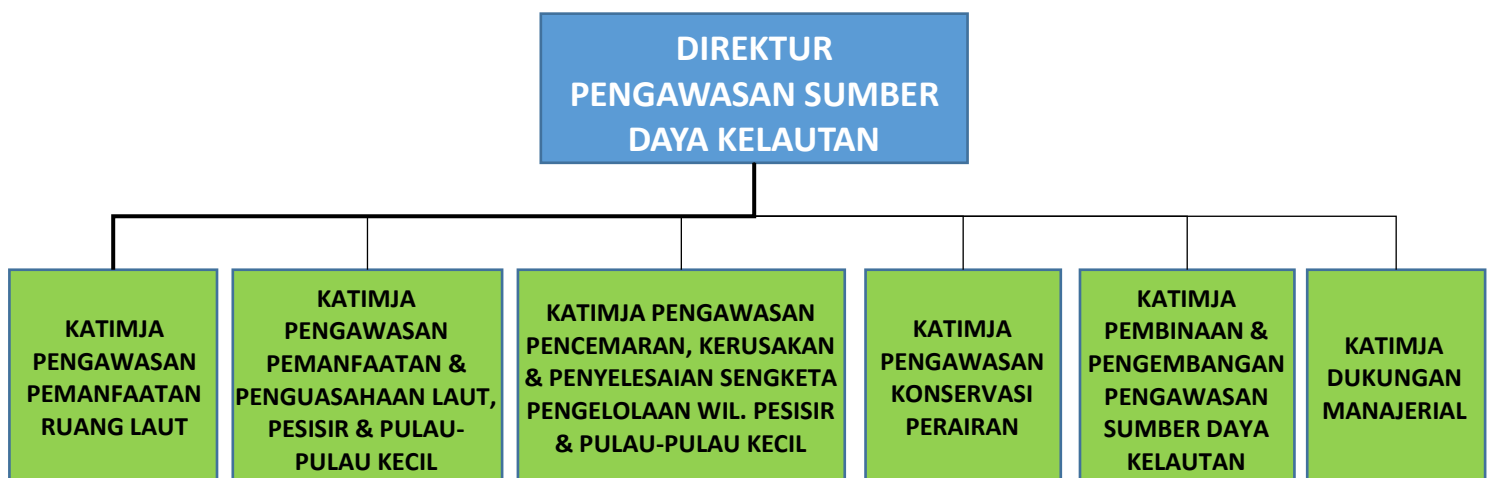
D. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 486/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;

2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
7. Urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

E. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PSDK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PSDK sampai dengan periode tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024.

A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 23A/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 – 2024 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Tatakelola SDKP bertanggung jawab;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76
	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	60	65	70	75	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88	89	89	90	90
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85	86	87	88	89

B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024

Pada tahun 2024, Direktorat PSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 16.701.293.000,- namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 12.701.293.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu:

1. Pemantauan produk, yang terdiri dari Rincian *Output* (RO) sebagai berikut:
 - 1) Supervisi, monev, dan Bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, 2) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, 3) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan, 4) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut, 5) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, dan 6) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan terhadap pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
4. Norma, Standard, Kriteria, Prosedur dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal

PSDKP Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024

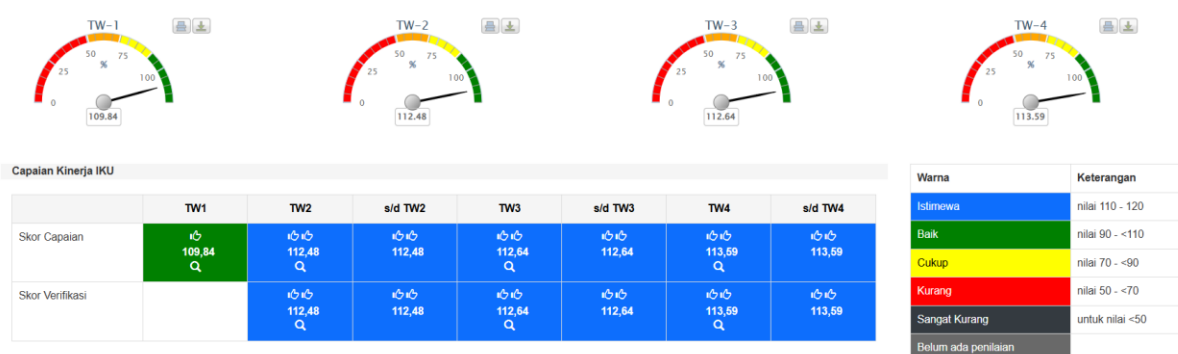
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK1.1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab	74
SK1.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan	80%
SK1.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	3. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	81
		4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan	60%
		5. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional	80
		6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK	80
		7. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80%
		8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa(%)	75%
		9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (%)	100%
		10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan Pengelolaan SDK	78
		11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1
SK1.4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)	100%
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)	82
		14. Nilai Pengawasan Arsip Internal Lingkup PSDKP	75
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%
		17. Nilai implementasi program budaya Kerja	21
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK	94%
		19. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat PPSDK	80%
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat PPSDK	80%
		21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDK	99,4%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024

Pengukuran kinerja melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 menunjukkan nilai 113,59. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PSDK pada tahun 2024 termasuk dalam kategori istimewa.



Gambar 2. Dashboard Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024

Adapun capaian indikator kinerja Direktorat PSDK periode tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW IV	CAPAIAN TW IV 2024	PERSEN TASE CAPAIAN
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)	74	74	79,60	107,57
2	Presentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	80	80	100	120,00
3	Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	81	81	99,75	120,00
4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	60	60	78,95	120,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW IV	CAPAIAN TW IV 2024	PERSEN TASE CAPAIAN
5	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemnfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (nilai)	80	80	100	120,00
6	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (nilai)	80	80	100	120,00
7	Persentase penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80	80	93,33	120,00
8	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	75	75	100	120,00
9	Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDK (nilai)	100	100	100	120,00
10	Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan SDK (nilai)	78	78	84,99	108,96
11	Inovasi yang dihasilkan Direktorat Pengawasan SDK (inovasi)	1	1	1	100,00
12	Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Pengawasan SDK (%)	100	100	100	100,00
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan SDK	82	82	83,31	101,60
14	Nilai Pengawasan Arsip Internal Lingkup PSDKP	75	75	96,71	120,00
15	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan SDK	84	84	84,95	101,13
16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan SDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	100	120,00
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	70	77,91	111,30
18	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan SDK	94	94	130,21	120,00
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pengawasan SDK	80	80	100	120,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW IV	CAPAIAN TW IV 2024	PERSEN TASE CAPAIAN
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengawasan SDK	80	80	100	120,00
21	Presentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK	99,4	99,4	99,94	100,54

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

S.K.1. Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya kelautan yang efektif

Sasaran kinerja terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya kelautan yang efektif ini mengampu 1 indikator kinerja yaitu, Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab. Dalam mencapai kinerjanya, indikator kinerja ini telah mengefesiensikan anggaran sebesar 0,5% dengan hitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Kegiatan Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumber daya kelautan yang efektif

No	KRO Kegiatan pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2352.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	500	502	100%	378,300,000	377,801,771	379,813,200	2,011,429
TOTAL					378,300,000	377,801,771	379,813,200	2,011,429

1. Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Bertanggung Jawab

Kegiatan penyadartahuan dilakukan Direktorat PSDK dengan tujuan untuk meingkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber

daya kelautan. Terhadap lokasi yang telah dilaksanakan kedepannya perlu dilakukan pemantauan apakah ada perubahan dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan. Kegiatan penyadartahuan diharapkan menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Pengukuran kinerja untuk indikator “Nilai paham masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab” dilakukan dengan mengukur nilai rata-rata dari jumlah total nilai kuisisioner yang diisi peserta.

Formula:

$$Z_{sdk} = \sum_{I=1}^N \frac{X_I}{n}$$

Keterangan:

- Z_{sdk} : Nilai rata-rata pemahaman masyarakat di bidang pengawasan sumber daya kelautan
- X_i : Jumlah nilai kuisisioner pemahaman masyarakat kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan
- n : Jumlah masyarakat yang diberikan kuisisioner di bidang pengawasan sumber daya kelautan dengan metode sampling

Tabel 5. Matriks Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Bertanggung Jawab Tahun 2024

Uraian	Peserta	Nilai
Penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut	133	11.890
Penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil	61	4.910
Penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan konservasi perairan	130	8.990
Jumlah	324	25.790

$$Z_{sdk} = \sum_{I=1}^N \frac{X_I}{n}$$

$$Z_{sdk} = \frac{25.790}{324}$$

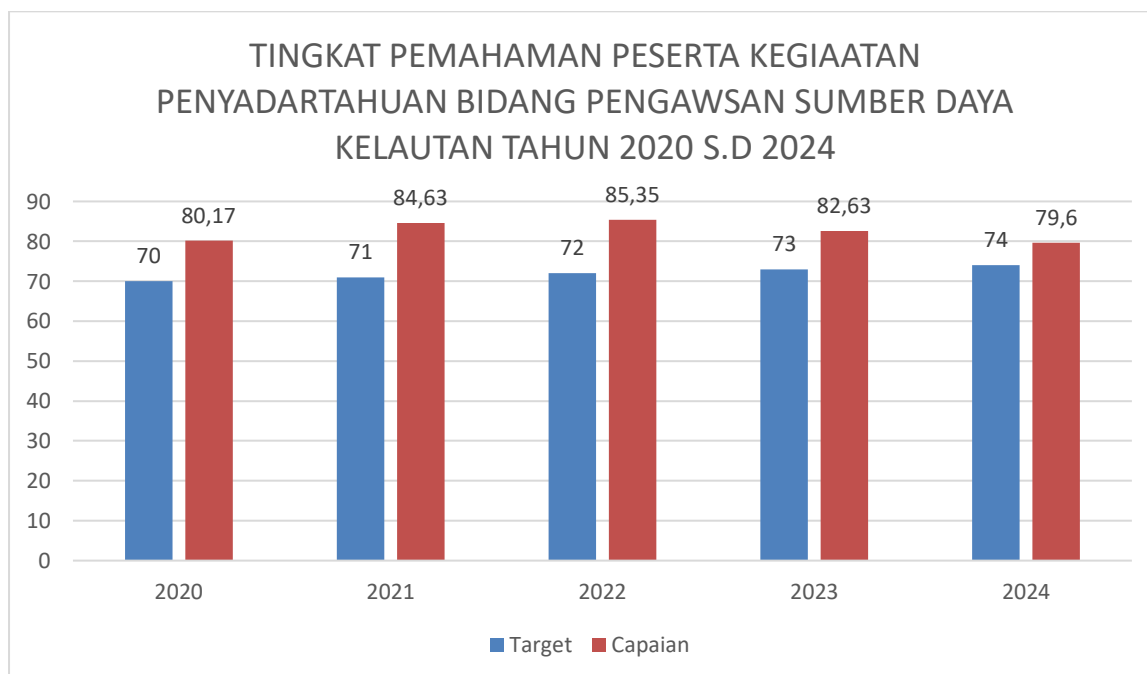
$$Z_{sdk} = 79,60$$

Pada tahun 2024, kegiatan penyadartahuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kegiatan penyadartahuan. Adapun capaian nilai pemahaman adalah 79,60. Capaian ini telah melampaui target pada tahun 2024 yaitu 74. Keberhasilan capaian ini dapat diperoleh karena kegiatan penyadartahuan dilaksanakan terhadap peserta yang memang secara langsung telah beraktivitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Tabel 6. Tabel Perbandingan Target, Capaian dan Persentase Capaian Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Bertanggung Jawab Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Target	Capaian	Persentase
2020	70	80,17	114,53
2021	71	84,63	119,20
2022	72	85,35	118,54
2023	73	82,63	113,19
2024	74	79,6	107,57

Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya, maka terjadi penurunan tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan sebesar 5,62%, namun jika dibandingkan dengan target RENSTRA 2024 telah melampaui. Capaian ini menurun dikarenakan minimnya informasi perihal peraturan pemanfaatan sumber daya kelautan yang dimiliki masyarakat. Terhadap capaian ini kedepannya perlu ditingkatkan melalui penambahan frekuensi pelaksanaan kegiatan dan penambahan variasi penyampaian materi.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Bertanggung Jawab Tahun 2020 s.d 2024

Capaian tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan apabila dibandingkan dengan unit kerja di Direktorat Jenderal PSDKP bisa disimpulkan bahwa tingkat pemahaman peserta penyadartahuan yang dilakukan oleh Direktorat PSDK memiliki capaian dengan nilai rendah jika dibandingkan dengan Direktorat Penanganan pelanggaran dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan Direktorat PSDP. Namun ketiganya telah melampaui target tahun 2024 yang mengindikasikan bahwa masyarakat kelautan dan perikanan telah memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 7. Matriks Perbandingan Capaian Nilai Pemahaman Masyarakat Tahun 2024 antara Dit. PSDP, Dit. PSDK dan Dit. PP

Dit. PSDP	Dit. PSDK	Dit. PP
79,47	79,6	84,35

Pada tahun 2024, kegiatan penyadartahuan masyarakat yang dilaksanakan adalah:

- Penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan di Provinsi Banten, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara;
- Penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Provinsi Bali;
- Penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan konservasi perairan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Papua Barat.

Kegiatan penyadartahuan masyarakat dimaksudkan untuk menyampaikan regulasi bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan

SK2. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan

Sasaran kinerja tersedianya data dan informasi intelijen kelautan ini mengampu 1 indikator kinerja, yaitu Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen kelautan. Dalam mencapai kinerjanya, indikator kinerja ini telah mengoptimalkan anggaran sebesar 0,2% dengan hitungan sebagai berikut:

Tabel 8. Matriks Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Kegiatan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

No	Output Kegiatan pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2352.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	2	2	100%	262,830,000	262,194,571	262,830,000	635,429
TOTAL					262,830,000	262,194,571	262,830,000	635,429

2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan

Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan dan pengambil keputusan / penindakan yang akan ditempuh. Presentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen kelautan merupakan rata-rata terhadap penyelesaian analisis data dan informasi.

Formula:

$$x_{intl} = \frac{a}{b} \times 100 \%$$

Keterangan:

- X_{intl} : Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan
 a : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang diselesaikan analisisnya
 b : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang diterima/dikumpulkan

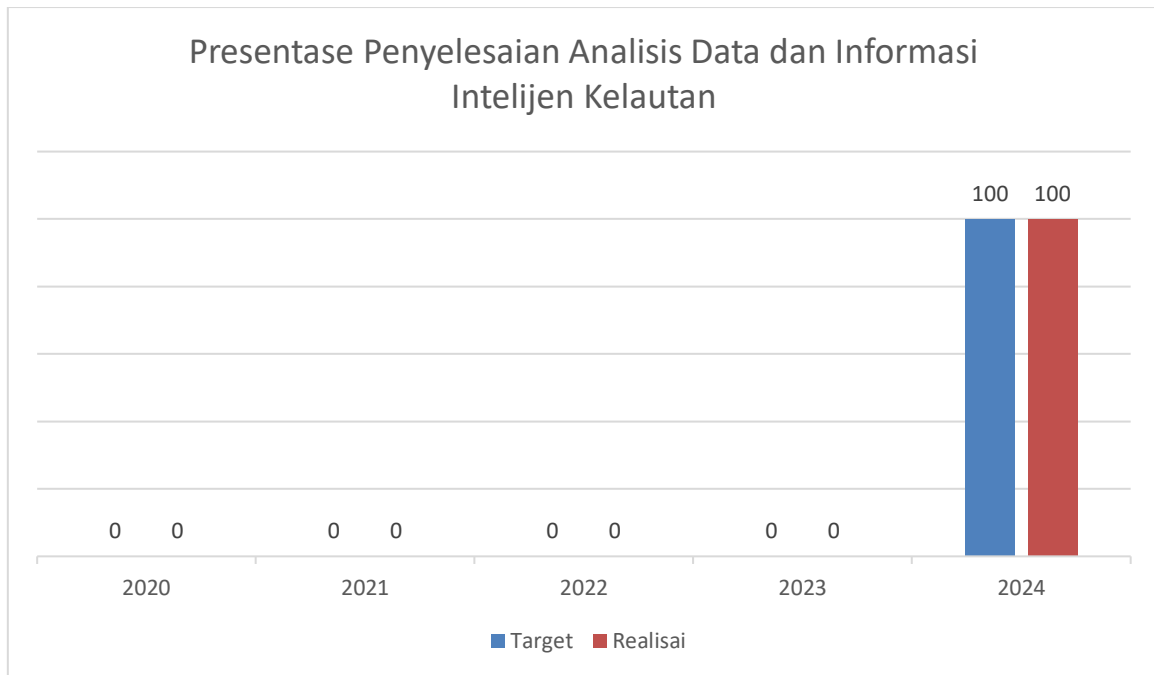
Kegiatan Intelijen kelautan pada tahun 2024 dilaksanakan untuk kegiatan *destructive fishing* di Lampung dan pemanfaatan pesisir di Banten.

$$x_{intl} = \frac{a}{b} \times 100 \%$$

$$x_{intl} = \frac{1+1}{1+1} \times 100 \%$$

$$x_k = 100$$

Capaian ini telah melampaui target yaitu 80%, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100% menandakan penyelesaian analisis data dan informasi intelijen kelautan telah terpenuhi seluruh prosesnya. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengingat ini merupakan indikator yang mulai ditetapkan pada tahun ini.



Gambar 4. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan Tahun 2020 s.d 2024

Apabila dibandingkan dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, capaian Direktorat sama dengan Direktorat PSDP. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP telah dilakukan analisis data dan informasi hasil kegiatan intelijen.

Tabel 9. Matriks Perbandingan Capaian Nilai Pemahaman Masyarakat Tahun 2024 antara Dit. PSDP dan Dit. PSDK

Dit. PPSDP	Dit. PPSDK
100%	100%

SK3. Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Sasaran kinerja terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan ini mengampu 9 (sembilan) indikator kinerja, yaitu :

- d. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan
- e. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha

Kelautan

- f. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau berdampak Nasional
- g. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
- h. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- i. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa
- j. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
- k. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDK
- l. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Dalam mencapai kinerjanya, indikator kinerja ini telah mengefisiensikan anggaran sebesar 2,6% dengan hitungan sebagai berikut:

Tabel 10. Matriks Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

No	Output Kegiatan pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2352.BII.001	Audit Pemanfaatan Ruang Laut yang Dilaporkan	1	1	100%	100,000,000	99,902,004	100,000,000	97,996
2352.AFA.001	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	4	4	100%	800,000,000	799,486,784	800,000,000	513,216
2352.BCE.001	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditangani	3	3	100%	1,830,000,000	1,828,300,435	1,830,000,000	1,699,565
2352.BKB.001	Hasil Pengawasan Kepatuhan Usaha Sektor kelautan yang dipantau	12	12	100%	4,257,169,000	4,254,908,779	4,257,169,000	2,260,221
2352.AEA.001	Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan	4	4	100%	3,023,856,000	3,022,922,462	3,023,856,000	933,538
2352.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	10	13	130%	833,600,000	832,869,890	1,083,680,000	250,810,110
TOTAL					10,011,025,000	10,005,520,464	11,094,705,000	256,314,646

3. Nilai Kualitas Verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan

Nilai kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan merupakan rata-rata terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Polsus PWP3K.

Formula:

$$Z_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- Z_{ver} : Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
 Xi : Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan
 n : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan yang diverifikasi

Pada tahun 2024, kegiatan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan yang telah Polsus PWP3K dan/atau Pengawas Perikanan lakukan terhadap pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan. Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan terhadap pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ikan dilindungi, pemanfaatan Kawasan konservasi nasional, wisata tirta lainnta, ekstrasi garam, reklamasi dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, penyelesaian verifikasi hasil pemerksaan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang tidak terindikasi DF. Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan pada form verifikasi yang ditandatangani oleh petugas verifikasi yang ditunjuk.

Pada tahun 2024 sebanyak 2.041 pelaku usaha yang sudah dilakukan verifikasi dengan nilai verifikasi sebagai berikut:

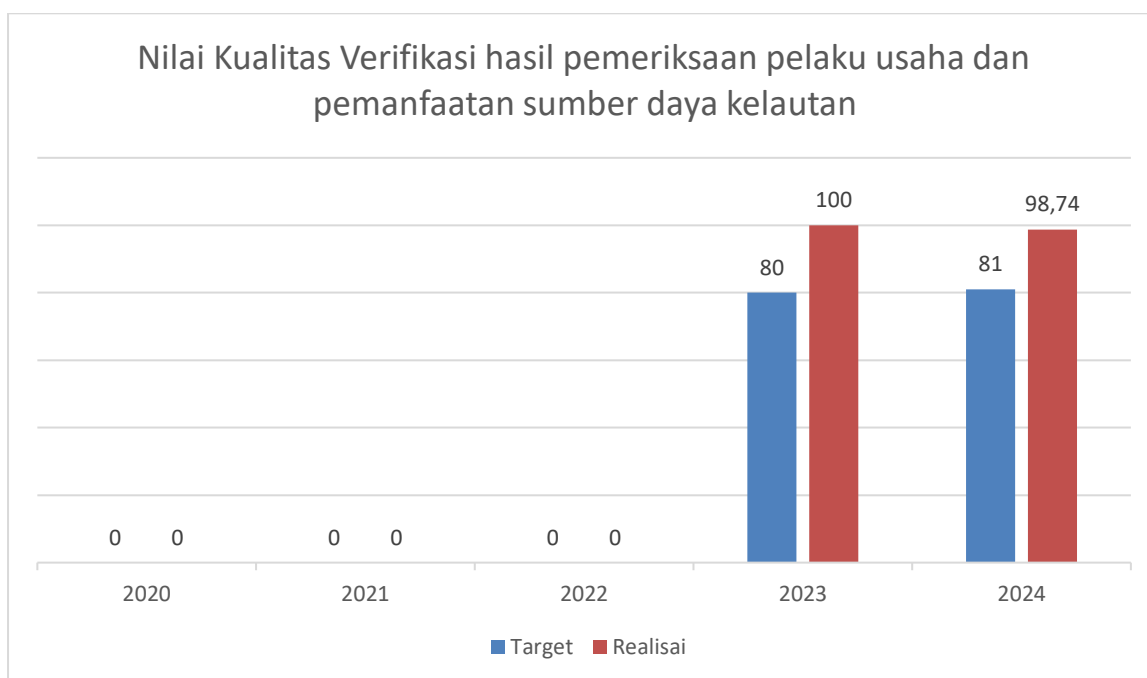
Tabel 11. Matriks Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Diverifikasi dengan Nilai Verifikasi

No	Obyek Pengawasan	Diverifikasi	Nilai Verifikasi
1	Pemanfaatan ruang laut	285	28.500
2	Jasa dan Produk kelautan	104	10.400
3	Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil	25	2.500
4	Pemanfaatan kawasan konservasi nasional	113	11.300
5	Pemanfaatan Ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES	151	15.100
6	Pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan/atau lingkungannya	506	50.094

No	Obyek Pengawasan	Diverifikasi	Nilai Verifikasi
7	<i>Destructive fishing</i>	857	85.700
Jumlah		2041	203.594
Rata-rata		99,75	

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa nilai kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan 98,74. Capaian ini mengindikasikan verifikasi yang dilakukan Dit. PSDK telah dilakukan dengan baik karena telah melampaui target yaitu 81.

Indikator ini apabila dibandingkan dengan tahun mengalami penurunan capaian indikator. Capaian pada tahun 2023 adalah 100 namun pada tahun 2024 turun menjadi 98,74. Hal ini dipengaruhi oleh nilai hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Direktorat PSDK.



Gambar 5. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Tahun 2020 s.d 2024

Apabila dibandingkan dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, capaian Direktorat PSDK lebih rendah jika dibandingkan dengan Direktorat PSDP yang memiliki capaian 100.

Tabel 12. Tabel Perbandingan Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Dit. PPSDP	Dit. PPSDK
100	99,75

4. Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan

Kegiatan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis akan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah jumlah tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diselesaikan dibagi total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan dikali dengan 100%.

Formula

$$Rk = (a/b) \times 100$$

Keterangan:

- Rk* : Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan
- a* : Jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diselesaikan
- b* : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan

Pada tahun 2024, sebanyak 228 rekomendasi dihasilkan dan disampaikan kepada UPT Lingkup Ditjen PSDKP untuk dilakukan tindak lanjut. Sebanyak 180 Rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis dalam hal untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.

Tabel 13. Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan

Objek Pengawasan	Target tindak lanjut (Rekomendasi) [a]	Realisasi Tindak Lanjut [b]
1. Pencemaran perairan	32	20
2. Kawasan Konservasi	110	99
3. P3LP3K	26	11
4. Pemanfaatan ruang laut	58	29
5. Jenis Ikan dilindungi CITES	0	0

Objek Pengawasan	Target tindak lanjut (Rekomendasi) [a]	Realisasi Tindak Lanjut [b]
6. Destructive Fishing	2	2
Total	228	161
Persentase ($Rk = (a/b) * 100\%$)	70.61	

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, capaian pada tahun 2024 adalah 78,95% dan telah melampaui target dan Renstra yaitu 60%. Capaian ini diperoleh apabila rekomendasi hasil verifikasi telah ditindaklanjuti.



Gambar 6. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Hasil Tindak Lanjut pada Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha

Indikator ini juga dimiliki oleh Direktorat PSDP yang melakukan penilaian tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan. Pada tahun 2024, capaian yang diperoleh Direktorat PSDP adalah 100. Nilai ini sama dengan capaian Direktorat PSDK yang memandakan bahwa rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan dan perikanan telah dilakukan tindak lanjut.

Tabel 14. Tabel Perbandingan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan Direktorat PSDK dengan Direktorat PSDP

Dit. PSDP	Dit. PSDK
100	100

Terhadap indikator ini, kedepannya masih perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan hasil rekomendasi. Indikator ini dimulai dari tahun 2023 sehingga jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, tahun 2023 maka terjadi penurunan terhadap tindak lanjut yang dilakukan.

5. Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya Kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional

Pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional adalah upaya pengaawaasan usaha kelautan atau Polsus PWP3K Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pealaku usaha kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.

Formula:

$$x_k = \frac{(X_{pkkprl} + X_{kkn} + X_{jasta} + X_{jil} + X_{wp3k} + X_{cemar})}{n}$$

Keterangan:

- X_k : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional
- X_{kkprl} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL)
- X_{kkn} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi
- X_{jasta} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan jasa dan produk kelautan
- X_{jil} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
- X_{wp3k} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah pesisir & pulau-pulau kecil
- X_{cemar} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran
- n : Jumlah pelaku usaha pemanfaatan SDK yang diperiksa kepatuhannya

$$x_k = \frac{(X_{pkkprl} + X_{kkn} + X_{jasta} + X_{jil} + X_{wp3k} + X_{cemar})}{n}$$

$$x_k = \frac{(0 + 0 + 0 + 0 + 300 + 0)}{3}$$

$$x_k = 100$$

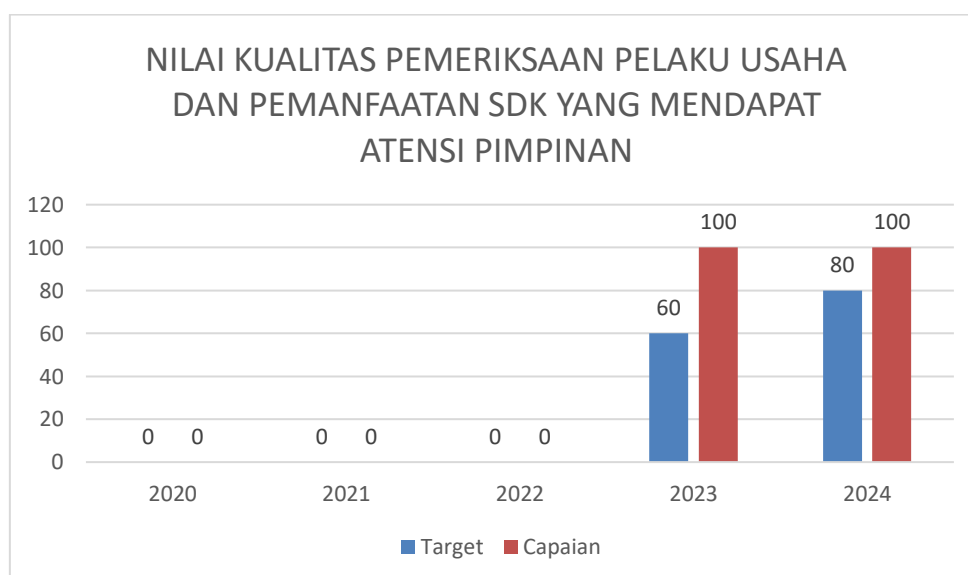
Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan ruang laut di Maratua terhadap 3 (tiga) pelaku usaha sehingga capaian indikator adalah 100 dan telah melampaui target 80. Adapun 3 pelaku usaha meliputi:

- Pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil di Maratua, Kalimantan Timur sudah memiliki KKPRL
- Pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan modal asing di Maratua, Kalimantan Timur belum memiliki KKPRL
- Pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan modal dalam negeri di Maratua, Kalimantan Timur belum memiliki KKPRL

Tabel 15. Tabel perbandingan capaian nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional Direktorat PSDK dengan Direktorat PSDP

Dit. PSDP	Dit. PSDK
100	100

Apabila dibandingkan dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, capaian Direktorat PSDK sama dengan Direktorat PSDP. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan pemeriksaan pelaku usaha sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi atensi pimpinan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.



Gambar 7. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan SDK yang Mendapat Atensi Pimpinan Tahun 2020 s.d 2024

Adapun capaian Indikator ini sama capaian tahun sebelumnya tahun 2023 dengan capaian 100. Direktorat PSDK memberikan perhatian besar terhadap kegiatan pemeriksaan pelaku usaha yang menjadi atensi pimpinan.

6. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman pengawas kelautan, baik yang ada di UPT PSDKP maupun Pemerintah Daerah sehingga tercipta kesamaan persepsi terkait mekanisme pengawasan sumber daya kelautan.

Kegiatan pengembangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan SDK serta meningkatkan sinergisitas pengawasan SDK antara PSDKP dengan K/L terkait dan Daerah sehingga tercipta mekanisme pengawasan SDK yang optimal.

Formula

$$X_{ef} = (x_a + x_b) / n$$

Keterangan

- X_{ef} : Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK
 X_a : Nilai tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan di UPT PSDKP (nilai bobot 40%)
 X_b : Nilai tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan di Pemerintah Provinsi (nilai bobot 60%)
 n_a : Jumlah UPT PSDKP yang dibina
 n_b : Jumlah Pemda yang dibina

Tabel 16. Matriks Nilai Tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan di Pemerintah Provinsi Tahun 2024

Keterangan	Nilai
Pembinaan Pemerintah Daerah	1300/13
1. Pembinaan Pemda Sulawesi Utara	100
2. Pembinaan Pemda Sulawesi Selatan	100
3. Pembinaan Pemda Sulawesi Barat	100
4. Pembinaan Pemda Sulawesi Tengah	100
5. Pembinaan Pemda Gorontalo	100
6. Pembinaan Pemda Sulawesi Tenggara	100
7. Pembinaan Pemda Bali	100
8. Pembinaan Pemda Nusa Tenggara Timur	100
9. Pembinaan Pemda Aceh	100
10. Pembinaan Pemda Kepulauan Riau	100
11. Pembinaan Pemda Bangka Belitung,	100
12. Pembinaan Pemda Kalimantan Selatan	100
13. Pembinaan Pemda Kalimantan Timur	100
Pembinaan UPT PSDKP	100/1
1. Pembinaan Pangkalan PSDKP Batam	100

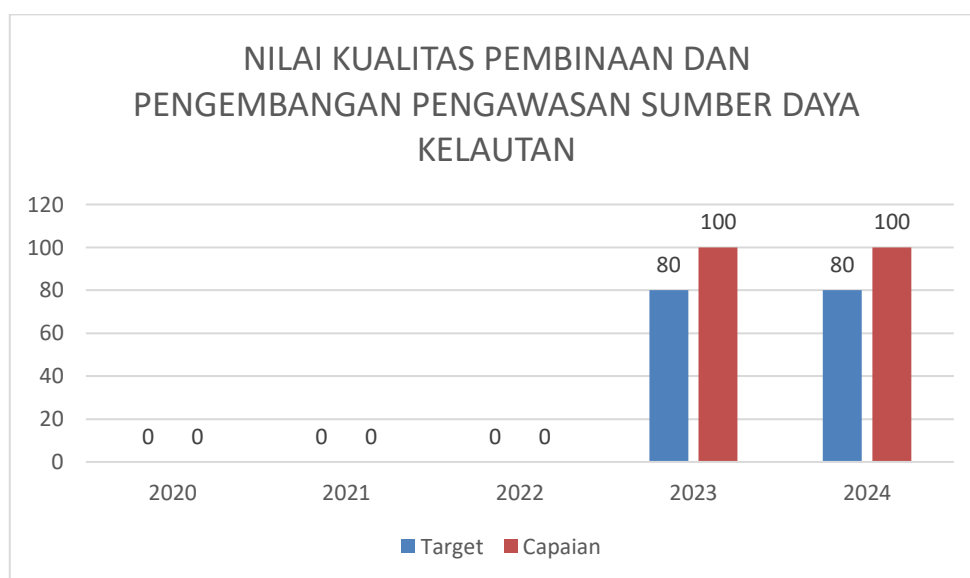
$$x_{ef} = x_a + x_b$$

$$x_k = \left(60\% * \left(\frac{1300}{13} \right) \right) + \left(40\% * \left(\frac{100}{1} \right) \right)$$

$$x_k = 100$$

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan penagwasan

sumber daya kelautan sebanyak 14 (empat belas) kali pelaksanaan, 13 (tiga belas) kali dengan pemerintah daerah dan 1 (satu) kali pembinaan dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Batam. Kegiatan pembinaan terhadap pemda dilaksanakan untuk memperkuat fungsi pengawasan kelautan di daerah. Sedangkan pembinaan terhadap UPT, diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan di UPT. Adapun capaiannya adalah 100, sehingga capaian ini telah melampaui target sebesar 80. Capaian indikator pada tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu dengan capaian 100.



Gambar 8. Grafik perbandingan nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan tahun 2020 s.d 2024

Indikator ini juga dimiliki oleh Direktorat PSDP yang merupakan unit kerja teknis dengan tugas dan fungsi pengawasan. Apabila dibandingkan, capaian Direktorat PSDK lebih tinggi daripada capaian Direktorat PSDKP dengan capaian 80,67.

Tabel 17. Matriks Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Direktorat PSDK dengan Direktorat PSDP Tahun 2024

Dit. PPSDP	Dit. PPSDK
80,67	100

7. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Persentase penyelesaian sengketa WP3K adalah capaian pelaksanaan penanganan

sengketa, berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Permen KP 28 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kejadian yang ahrus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa WP3K antara lain kapal kandas, reklamasi, tumpahan minyak, pasir laut dan alih fungsi lahan serta kejadian kerusakan dan atau pencemaran lainnya.

Tabel 18. Matriks Perhitungan Capaian Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

No.	Waktu Kejadian	Nama Kapal	Pemilik/ Operator	Lokasi Kandas	Total Kerusakan (m ²)	Tahapan	Capaian
1.	23 Agustus 2022	BG SBS 3309	PT. Haluang Samudra Indonesia	Perairan Teluk Tolo Pulau Langala Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Koordinat: 2°48'53,95" LS dan 122°10'48,25" BT	180,473	Negosiasi	80
2.	23 Juli 2023	Tongkang USJ IX	PT. Usda Seroja Jaya	Perairan Pulau Pempang Kepulauan Anambas (zona pemanfaatan terbatas Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas) Provinsi Kepulauan Riau. Koordinat: 3°7'47,15"LU dan 106°25'54,54" BT	190,44	Lunas pembayaran ganti kerugian Rp2.325.978.851,65	100
3.	13 Januari 2024	KM Armada Sejati	PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)	Perairan Pulau Samalona Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	28,62	Lunas pembayaran ganti kerugian Rp1.166.340.500,98	100

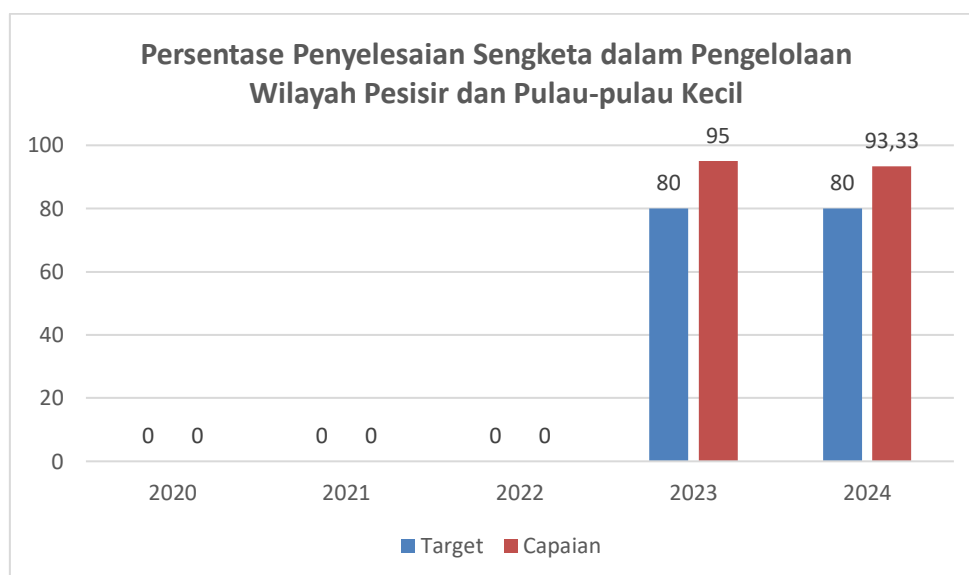
$$X_{skt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

$$X_{skt} = \frac{80 + 100 + 100}{3}$$

$$= 93,33$$

Capaian ini adalah telah melampaui target sebesar 80%. Ada 3 sengketa yang

ditangani oleh Direktorat PSDK dimana 2 telah mencapai kesepakatan dan penetapan ganti kerugian. Sedangkan 1 sengketa masih tahap negosiasi dikarenakan belum adanya perihal luasan kerusakan dan besaran ganti kerugian. Capaian indikator ini menurun dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2023 yang sebelumnya 95%. Adapun indikator ini ada di Direktorat PSDK mengingat penyelesaian sengketa WP3K hanya ditangani oleh Direktorat PSDK saja.



Gambar 9. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2020 s.d 2024

8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha atas Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dinyatakan selesai ketika pelaku usaha telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati pada Berita Acara Penyelesaian Sengketa. Bentuk penyelesaian dapat berupa telah membayar secara penuh / lunas nilai ganti kerugian ke kas negara (PNBP), melaksanakan ganti kerugian kepada masyarakat dan/atau menyelesaikan restorasi yang disepakati. Capaian pada tahun 2024 adalah 100%.

Tabel 19. Matriks Perhitungan Realisasi Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha atas Penyelesaian Sengketa

No.	Waktu Kejadian	Pemilik/ Operator	Lokasi Kandas	Total Kerusakan (m ²)	Kewajiban	Realisasi	
1.	23 Juli 2023	PT. Usda Seroja Jaya	Perairan Pulau Pempang Kepulauan Anambas (zona	190,44	pembayaran ganti kerugian Rp2.325.978.851,65	Lunas	100

			pemanfaatan terbatas Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas) Provinsi Kepulauan Riau. Koordinat: 3°7'47,15"LU dan 106°25'54,54" BT		Pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat	Lunas	100
					Kemajuan Restorasi	Tidak ada kewajiban	100
2.	13 Januari 2024	PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)	Perairan Pulau Samalona Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	28,62	pembayaran ganti kerugian Rp1.166.340.500,98	Lunas	100
					Pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat	Tidak ada kewajiban	100
					Kemajuan Restorasi	Tidak ada kewajiban	100

Keterangan:

* Apabila tidak ada kewajiban maka capaian sama dengan 100

Tabel 20. Matriks Perhitungan Capaian Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha atas Penyelesaian Sengketa

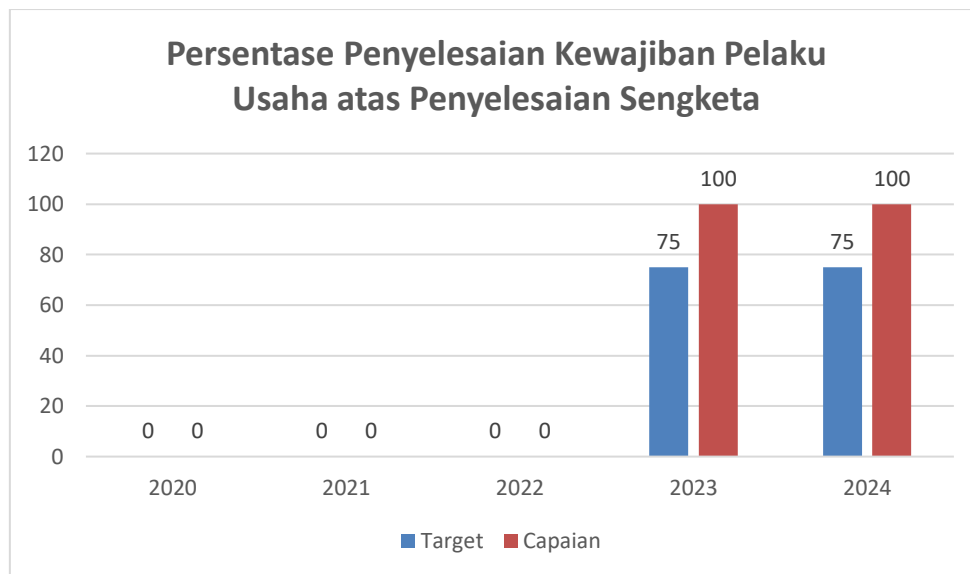
Pembayaran Ganti kerugian ekosistem (X_1)	Pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat (X_2)	Kemajuan Restorasi (X_3)
$(\frac{a}{b}) \times 100\%$	$(\frac{c}{d}) \times 100\%$	$(\frac{e}{f}) \times 100\%$
$(\frac{2.325.978.851,65 + 1.166.340.500,98}{2.325.978.851,65 + 1.166.340.500,98}) \times 100\%$	$(\frac{100 + 100}{2}) \times 100\%$	$(\frac{100 + 100}{2}) \times 100\%$
100	100	100

$$X_{sgkt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + X_3)}{3}$$

$$X_{skt} = \frac{100 + 100 + 100}{3}$$

$$= 100$$

Capaian ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa telah seluruhnya dilaksanakan. Terhadap capaian ini kedepannya perlu dipertahankan dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban para pelaku usaha yang telah mencapai kesepakatan dengan KKP dalam hal penyelesaian sengketa pengelolaan silayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Capaian indikator ini sama dengan capaian tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%.



Gambar 10. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha atas Penyelesaian Sengketa Tahun 2020 s.d 2024

9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan SDK

Indikator kinerja nilai penyelesaian rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan SDK merupakan bentuk tanggung jawab Direktorat PSDK untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengawasan SDK.

Formula:

$$X_{nspk} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$$

Keterangan:

- X_{nspk} : Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK
- X_i : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK Lingkup Direktorat PPSDK
- n : Jumlah rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK yang diselesaikan

Setiap produk kebijakan Direktorat PPSDK diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

Tabel 21. Matriks Perhitungan Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan SDK

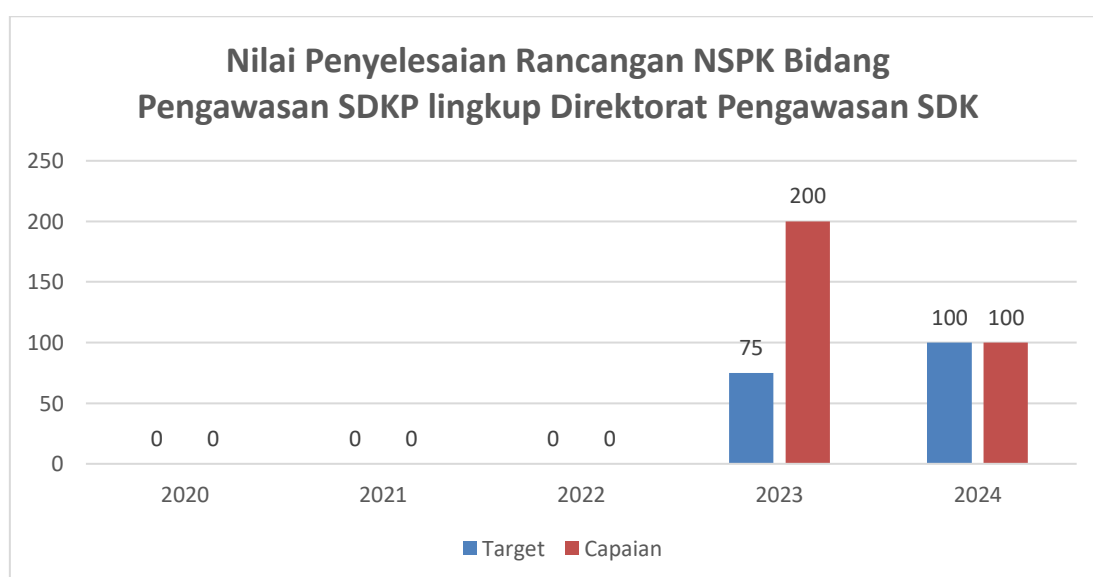
No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> · Identifikasi substansi · Outline · Zero drat
2	Pelaksanaan	70	<ul style="list-style-type: none"> · Pembahasan draft · Uji publik draft · Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

$$x_{nspk} = \frac{(X_{ALSE} + X_{BMKT} + X_{DF} + X_{intelijen})}{n}$$

$$x_k = \frac{(100 + 100 + 100 + 100)}{4}$$

$$x_k = 100$$

Capaian pada tahun 2024 adalah 100 dimana capaian ini telah melampaui target 100. NSPK yang telah dihasilkan pada tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengawas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan. Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat penurunan dari 200 menjadi 100. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan metode penghitungan indikator kinerja.



Gambar 11. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Nilai Penyelesaian Rancangan

NSPK Bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan SDK
Tahun 2020 s.d 2024

Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka bisa disimpulkan bahwa, capaian Direktorat PSDK sama dengan capaian unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

Tabel 22. Matriks Perbandingan Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan SDK Direktorat PSDK dengan Direktorat PSDP Tahun 2024

Dit. POA	Dit. PSDK	Dit. PSDP	Dit. PP
100	100	100	100

10. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat Pengawasan SDK

Tingkat pemahaman peserta bimtek adalah tingkat kemampuan peserta bimbingan teknis dalam memahami tata cara pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang menjadi materi bimtek. Tingkat pemahaman diperoleh dari nilai *posttest* pada setiap bimtek yang dilakukan Direktorat PSDK.

Tabel 23. Matriks Rekapitulasi Nilai Posttest Kegiatan Bimtek
Lingkup Direktorat PSDK Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	PESERTA	NILAI POSTEST
1	Bimbingan Teknis pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dan penyelesaian sengketa PWP3K di Cilacap	39	3.230
2	Bimbingan Teknis pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dan penyelesaian sengketa PWP3K di Lampulo	13	1.130
3	Bimbingan Teknis pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dan penyelesaian sengketa PWP3K di Surabaya	9	810
4	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau CITES di Benoa	59	5015
5	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau CITES di Makassar	19	1628
Jumlah		139	11.831
Rata-rata		84,99	

Cara Menghitung:

$$BT_{sdk} = \frac{X_i + \dots + X_n}{n}$$

Keterangan:

BT_{sdk} = Tingkat pemahaman peserta bimtek

X_i = Nilai yang diperoleh peserta bimtek

n = Jumlah peserta kegiatan bimtek

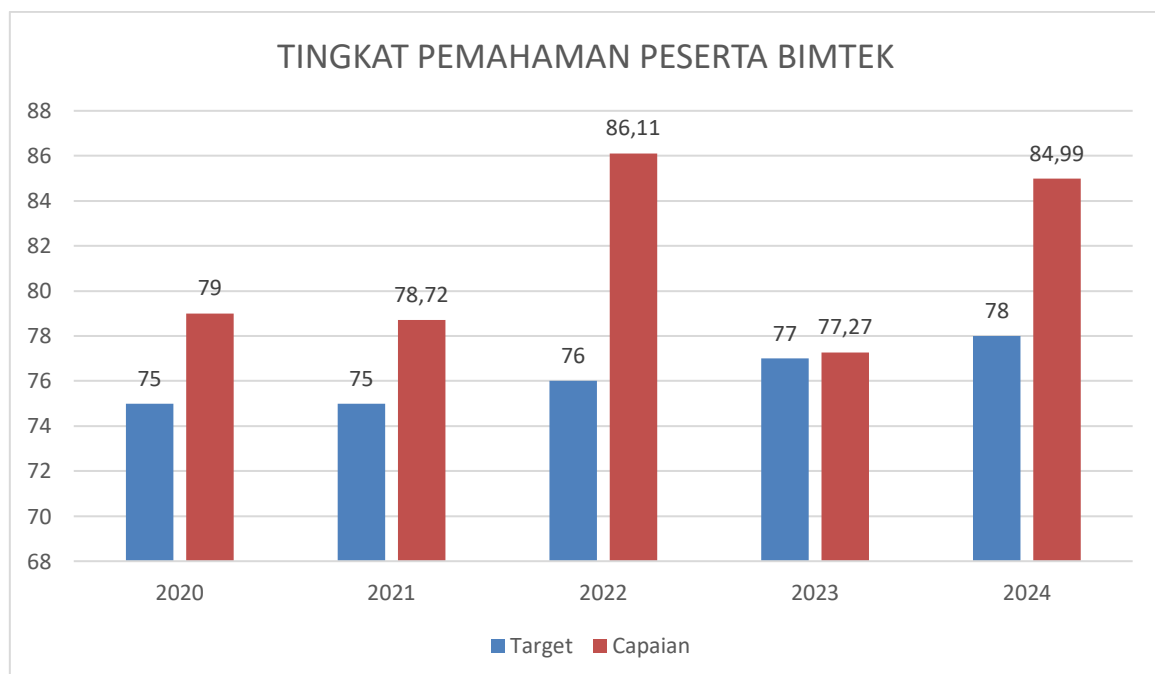
Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat PPSDK

$$BT_{sdk} = \frac{X_i + \dots + X_n}{n}$$

$$BT_{sdk} = \frac{3.230 + 1.130 + 810 + 5015 + 1628}{139}$$

$$BT_{sdk} = 84,99$$

Kegiatan bimbingan teknis pada tahun 2024 dilaksanakan di Cilacap, Lampulo, Surabaya, Benoa dan Makassar. Adapun materi yang diberikan adalah mengenai kebijakan pengawasan dan teknis pengawasan SDK dengan peserta adalah Polsus PWP3K dan Pengawas Prikanan. Nilai pemahaman peserta bimtek diperoleh sebesar 84,99 capaian ini telah memenuhi target tahun 2024 yaitu 78. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman yang memadai untuk melaksanakan pengawasan SDK.



Gambar 12. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024

Capaian pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami

kenaikan. Capaian indikator ini selama 5 tahun terakhir mengalami dinamika peningkatan dan penurunan, terhadap tingkat pemahaman ini perlu dilakukan upaya peningkatan melalui metode penyampaian materi dan peningkatan frekuensi bimtek.

Tabel 24. Matriks Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Setditjen PSDKP, Dit. POA, Dit. PSDK, Dit. PSDP, dan Dit. PP

Setditjen PSDKP	Dit. POA	Dit. PSDK	Dit. PSDP	Dit. PP
87,81	82	84,99	83,36	86,09

Tingkat pemahaman peserta bimtek apabila dibandingkan dengan antar unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, capaian Direktorat PSDK lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Direktorat POA dan Direktorat PSDP. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Setditjen PSDKP dan Direktorat PP, capaian Direktorat PSDK lebih rendah. Kelima unit eselon II lingkup Ditjen PSDKP telah melampaui target sebesar 78. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta bimtek telah memiliki kemampuan yang mencukupi untuk melaksanakan penagwasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

11. Inovasi yang dihasilkan Direktorat Pengawasan SDK

Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, kriteria baik bersifat manual/mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Inovasi dihasilkan menggunakan konsep Gugus Kendali Mutu, yaitu penggunaan 9 (delapan) langkah dan 7 (tujuh) alat quality control. Pada tahun 2024 Direktorat PSDK menghasilkan inovasi **“Manta Channel “Eksklusif”**”.



Gambar 13. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Inovasi yang dihasilkan Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024

Program inovasi lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah dilakukan sejak tahun 2020, dimana masing-masing unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP menghasilkan 1 inovasi. Hal ini mengindikasikan selalu ada upaya inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSDK. Pada tahun 2024, masing-masing unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP juga menghasilkan 1 inovasi lingkup unit kerja masing-masing. Dalam hal pencapaian terciptanya inovasi ini, Direktorat PSDK perlu meningkatkan antusiasme pegawai untuk terus berinovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSDK kedepannya.

Tabel 25. Matriks Perbandingan Capaian Inovasi yang dihasilkan Setditjen PSDKP, Dit. POA, Dit. PSDK, Dit. PSDP, dan Dit. PP Tahun 2024

Setditjen PSDKP	Dit. POA	Dit. PSDK	Dit. PSDP	Dit. PP
1	1	1	1	1

SK4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP ini mengampu 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK
2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDK
3. Nilai Pengawasan Arsip Internal Lingkup PSDKP
4. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
5. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
6. Nilai implementasi program budaya Kerja
7. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDK
8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat PSDK
9. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat PSDK
10. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK

Dalam mencapai kinerjanya, indikator kinerja ini telah mengefisiensikan anggaran

sebesar 0,9% dengan hitungan sebagai berikut :

Tabel 26. Matriks Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Kegiatan Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

No	Output Kegiatan pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2355.EBA.994	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PSDK	1	1	100%	1,253,660,000	1,239,246,350	1,253,660,000	14,413,650
2355.EBA.962	Layanan Umum Rumah Tangga Direktorat PSDK	1	1	100%	403,000,000	402,113,499	403,000,000	886,501
TOTAL					1,656,660,000	1,641,359,849	1,656,660,000	15,300,151

12. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Dit. PSDK (%)

Pengendalian kerja sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

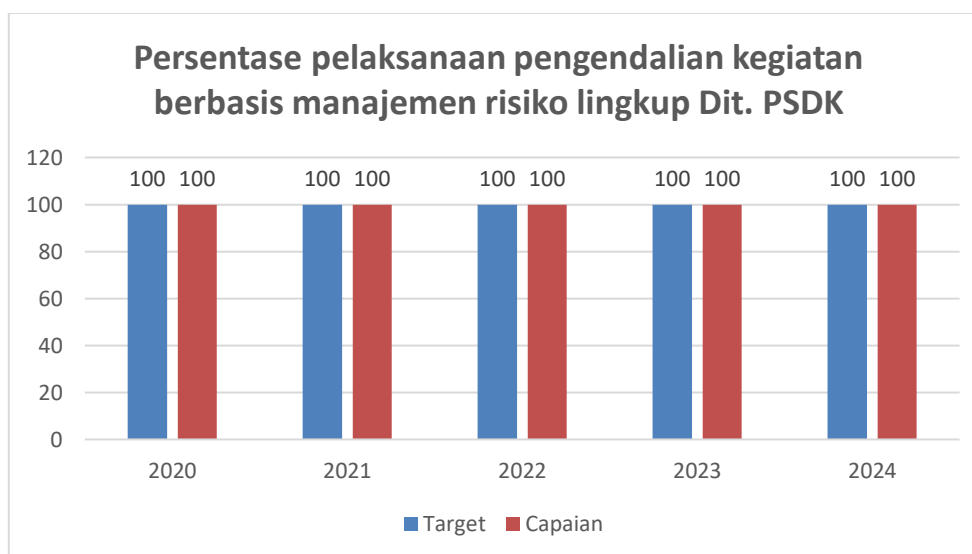
Pekerjaan yang peril dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi :

- (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruhnya pada perubahan anggaran / kegiatan baru / struktur organisasi,
- (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relative besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negative pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja,
- (iii) pengadaan bara/jasa yang memiliki Tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar Kementerian.

Tabel 27. Matriks Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Dit. PSDK Tahun 2024

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP			
	Direktorat POA	39	39	100%
	Direktorat PPSDP	8	8	100%
	Direktorat PPSDK	6	6	100%
	Direktorat PP	16	16	100%

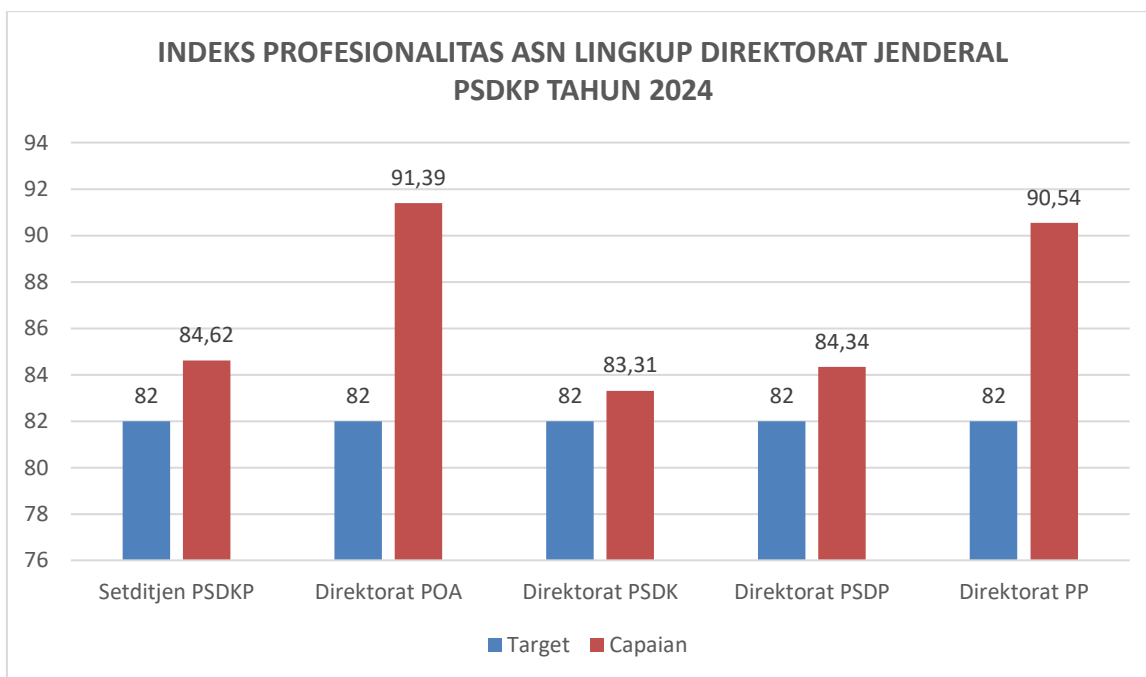
Pada tahun 2024, capaian untuk indikator ini adalah 100%. Capaian ini apabila dibandingkan dengan unit eselon II lingkup Ditjen PSDKP sama dengan capaian unit kerja lain pada angka 100%. Capaian ini mengindikasikan seluruh kegiatan dengan resiko telah dilakukan pengendalian. Apabila dilakukan perbandingan dengan 5 tahun sebelumnya, capaian ini konsisten pada angka 100%. Hal ini perlu dipertahankan dengan tetap menerapkan pengendalian kegiatan yang berbasis manajemen risiko.



Gambar 14. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Dit. PSDK Tahun 2020 s.d 2024

13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan SDK

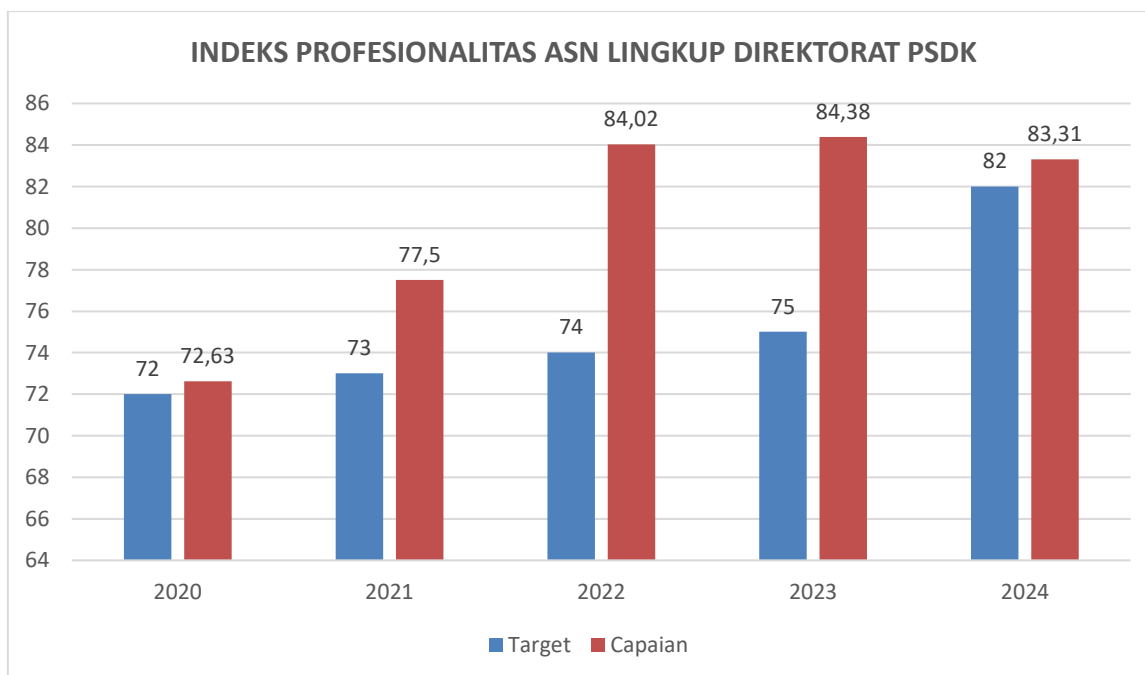
Profesionalitas Asn diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, kinerja dan disiplin per masing-masing pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Indeks bisa diperoleh dari laman ropeg.kkp.go.id dengan nilai 83,31.



Gambar 15. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024

Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDK pada tahun 2024 adalah 83,31 nilai ini telah melampaui target pada tahun ini yaitu 82 dan dapat dikategorikan tinggi. Disamping itu, capaian IP ASN Direktorat PSDK merupakan capaian paling rendah apabila dibandingkan dengan capaian di unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh keaktifan pegawai lingkup Direktorat PSDK dalam mengikuti peningkatan kompetensi diri baik melalui pendidikan, pelatihan maupun seminar. Sebagai upaya perbaikan, seluruh pegawai lingkup Direktorat PSDK perlu lebih aktif mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi diri baik melalui pelatihan maupun pendidikan formal.

Apabila dibandingkan dengan capaian IP ASN Direktorat PSDK pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 84,02 menjadi 83,31. Namun capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2020 dan 2021. Perlu dilakukan upaya peningkatan keaktifan pegawai dalam pengembangan kompetensi diri.



Gambar 16. Grafik Perbandingan Target dan Capaian INDEKS PROFESIONALITAS ASN Lingkup Direktorat PSDK Tahun 2020 - 2024

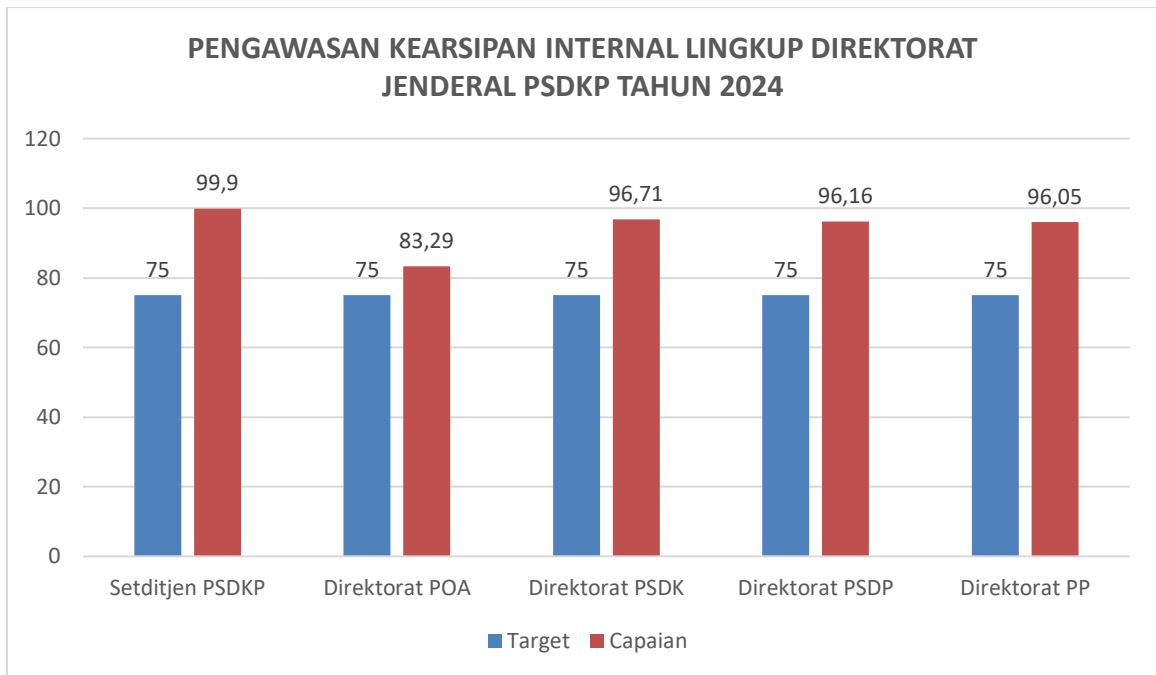
14. Nilai Pengawasan Arsip Internal Lingkup PSDKP

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- 1) Pengawasan sistem kearsipan internal,
- 2) Pengawasan pengelolaan arsip aktif, dan
- 3) Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Direktorat Jenderal PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh kepala Biro umum dan PBJ.

Nilai pengawasan arsip internal Direktorat PSDK tahun 2024 adalah 96,71 dengan kategori AA atau sangat memuaskan. Capaian ini sudah melampaui target sebesar 75. Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian unir kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka capaian ini lebih rendah dibandingkan Setditjen PSDKP, namun lebih tinggi dibandingkan Direktorat PSDP, Direktorat PP dan Direktorat POA. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan indikator yang baru muncul pada tahun 2024.



Gambar 17. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024

Nilai Pengawasan kearsipan Internal lingkup direktorat PSDK merupakan indikator kinerja yang baru muncul pada tahun 2024 sehingga tidak masuk pada renstra PSDKP tahun 2020 - 2024 dan tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 18. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat PSDK Tahun 2020 - 2024

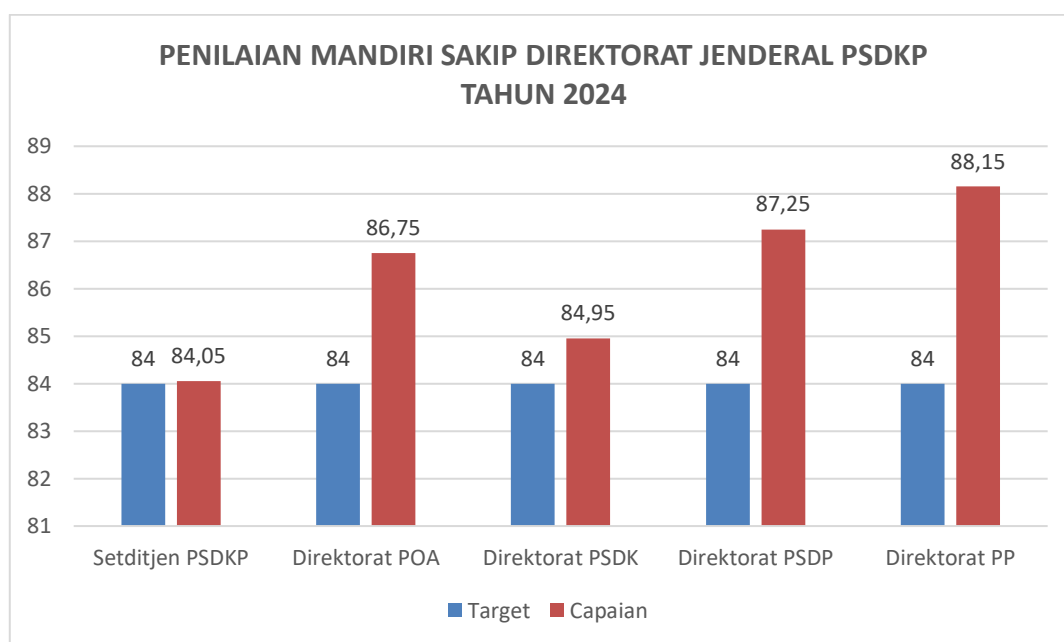
15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan SDK

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Tabel 28. Matriks Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan SDK

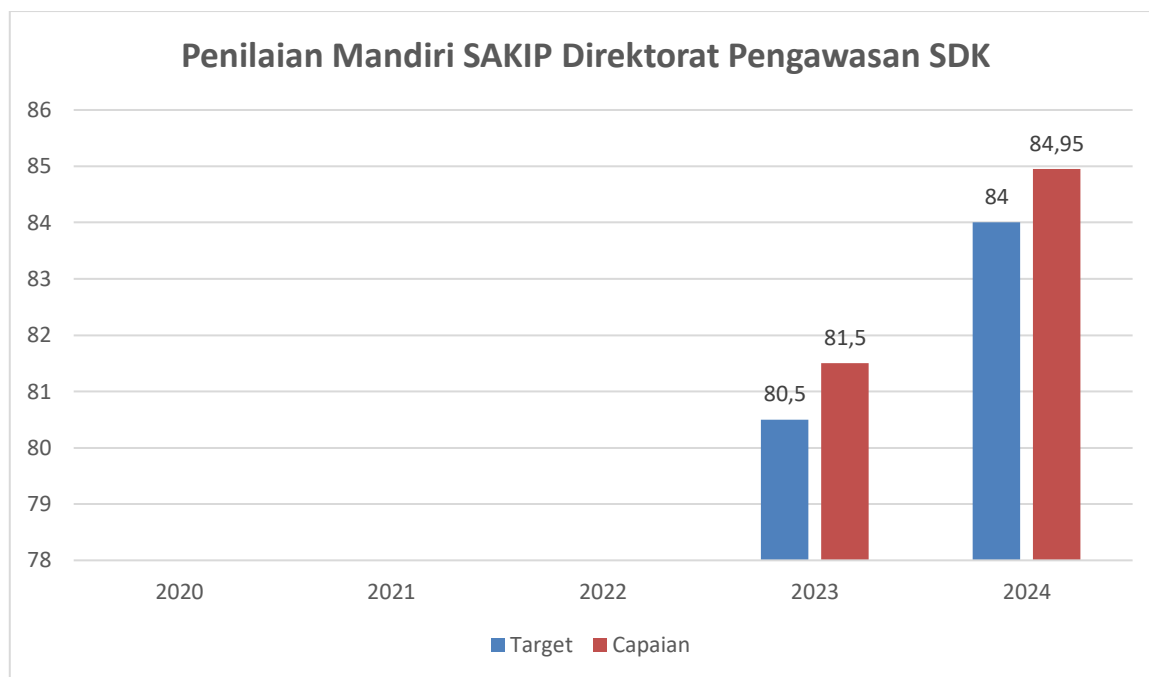
NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	0603800000	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN LKE Satker	25,80	27,60	12,30	19,25	84,95	A

Pada tahun 2024 Direktorat PSDK mendapatkan nilai 84,95 dengan kategori nilai A. Capaian Direktorat PSDK apabila dibandingkan dengan unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDK merupakan capaian terendah.



Gambar 19. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal PSDK

Capain ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023, mengalami kenaikan dari 81,5 menjadi 84,95. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan penyusunan dokumen SAKIP dan pemanfaatannya dalam pengambilan kebijakan.



Gambar 20. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP
Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024

16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

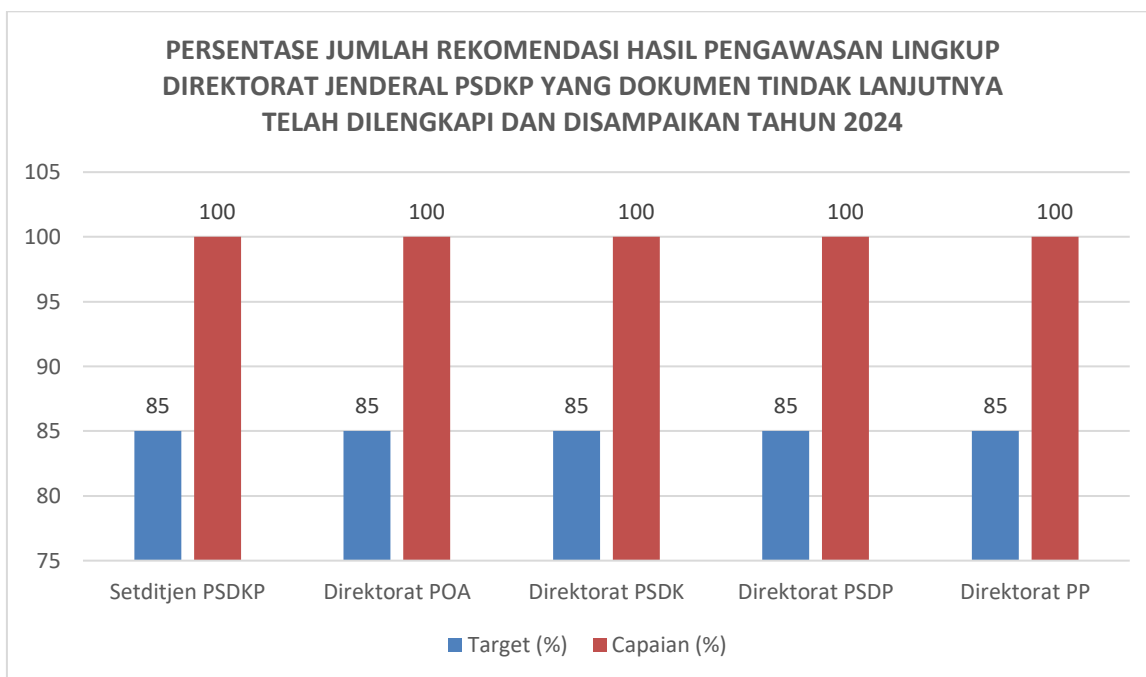
Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Direktorat PSDK yang dalam hal ini anggaran telag menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat suara maupun bab) yang periode tahun 2024 telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat jenderal KKP.

Tabel 29. Matriks Perhitungan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
5	5	100.00	0	0

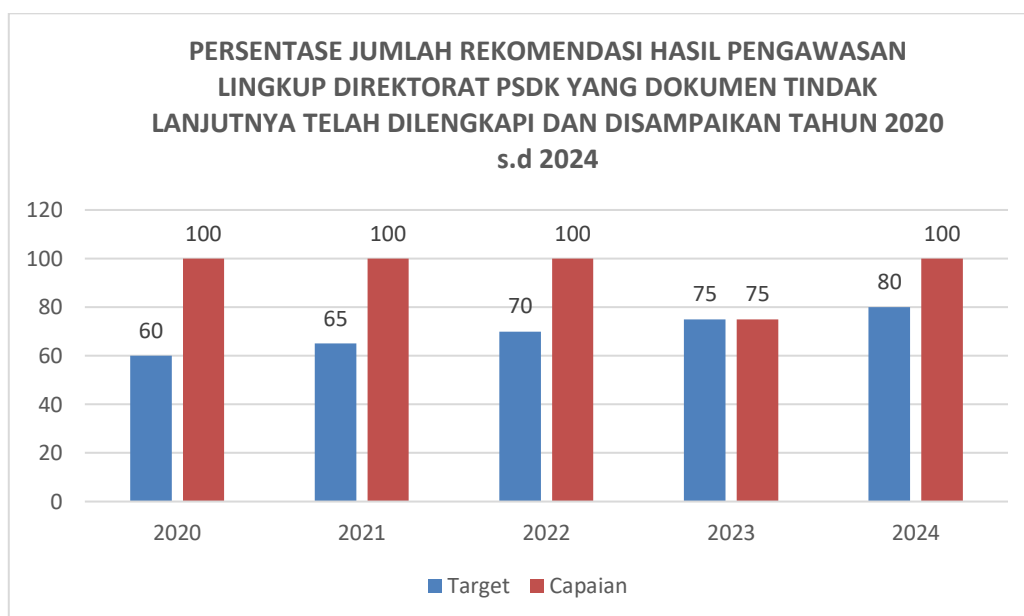
Capaian persentasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada periode tahun 2024 adalah 5 yang direkomendasikan dan telah ditindak lanjuti 5 sehingga capaian menjadi 100%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 80%. Nilai ini diperoleh sebagai hasil telah ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat

jenderal KKP sampai tahun 2024.



Gambar 21. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan capaian unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka capaian ini sama dengan seluruh unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dimana sudah tidak memiliki sisa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.



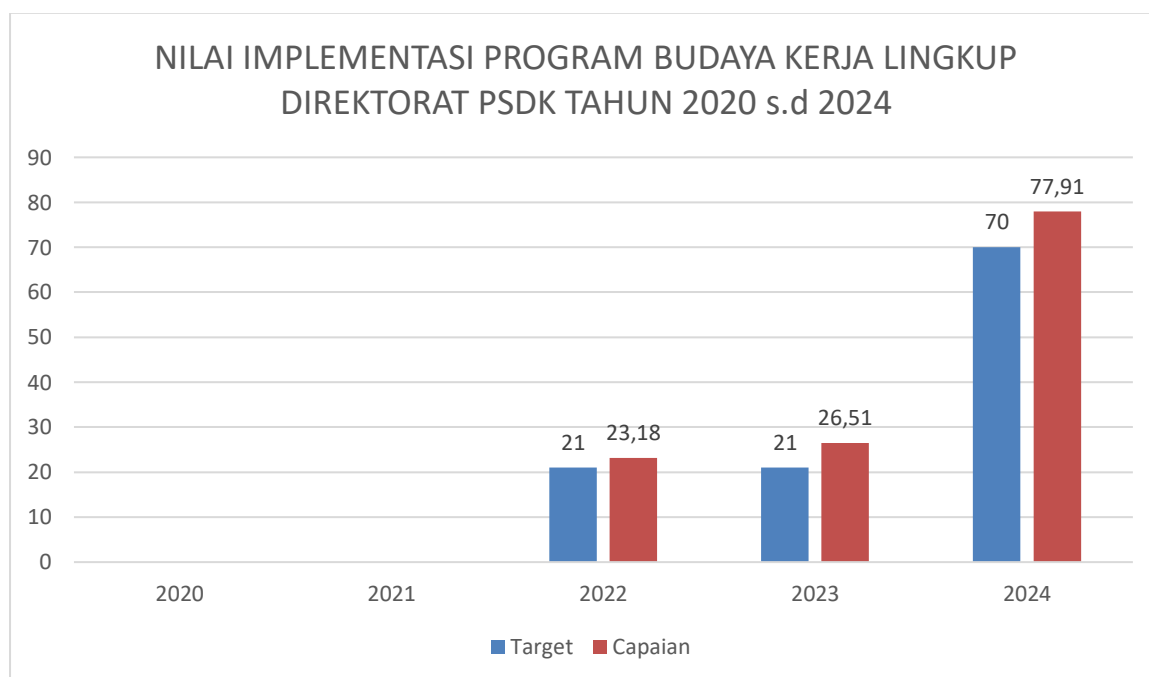
Gambar 22. Grafik Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi

Hasil Pengawasan Lingkup Dit. PSDK yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Tahun 2020 s.d 2024

Capaian pada 2024 meningkat dari capaian tahun 2023 menjadi sebesar 100%. Hal ini dipengaruhi oleh tindak lanjut rekomendasi dimana pada tahun 2023 tidak terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dan disampaikan sedangkan pada tahun 2024 terdapat rekomendasi yang telah tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.

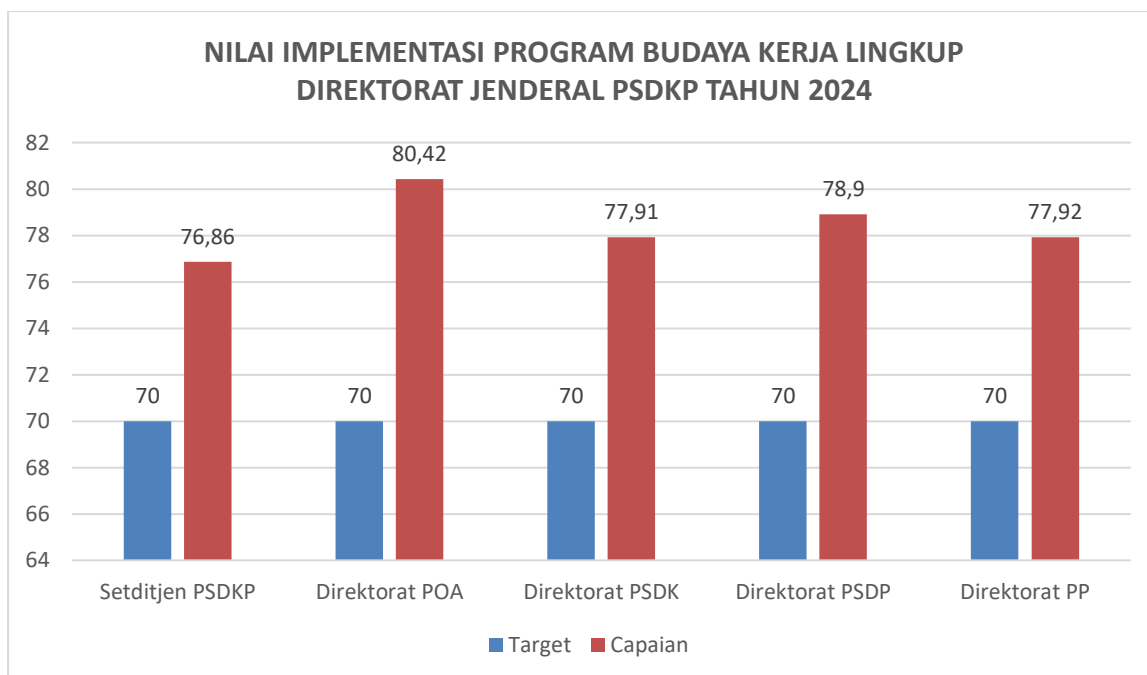
17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari Lembar Kerja Evaluasi yang dilakukan oleh tim budaya kerja. Indikator ini adalah indikator yang baru ada pada tahun 2023. Adapun capaian pada tahun 2024 adalah 77,91. Capaian ini telah melampaui target sebesar 70. Capaian ini mengindikasikan bahwa telah dilaksanakannya budaya kerja PSDKP di Direktorat PSDK.



Gambar 23. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK Tahun 2020 s.d 2024

Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan dari 26,51 menjadi 77,91. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan implementasi program budaya kerja di Direktorat PSDK.



Gambar 24. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024

Capaian indikator ini apabila dibandingkan unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka Capaian Direktorat PSDK lebih tinggi dari Setditjen PSDKP dan lebih rendah dari Direktorat POA, Direktorat PSDP dan Direktorat PP.

18. Presentase unit kerja yang penerapan system manajemen pengetahuan yang tersandar lingkup Dit. PSDK

Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup KKP dilakukan atas :

- (i) Tingkat sharing dokumen mandatory;
- (ii) Tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta;
- (iii) Tingkat keaktifan unit kerja dalam system informasi manajemen pengetahuan.

Pada tahun 2024, system informasi manajemen pengetahuan adalah aplikasi colaboratif Office pada tautan <https://portal.kkp.go.id>.

Pada tahun 2024, capaian undikator kinerja adalah 130,21% capaian ini telah melampaui target yaitu 94%. Capaian ini mengindikasikan bahwa ada keaktifan pegawai pada system informasi manajemen pengetahuan Dimana penilaian dilakukan terhadap pelaku Direktur dan Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat PSDKP.

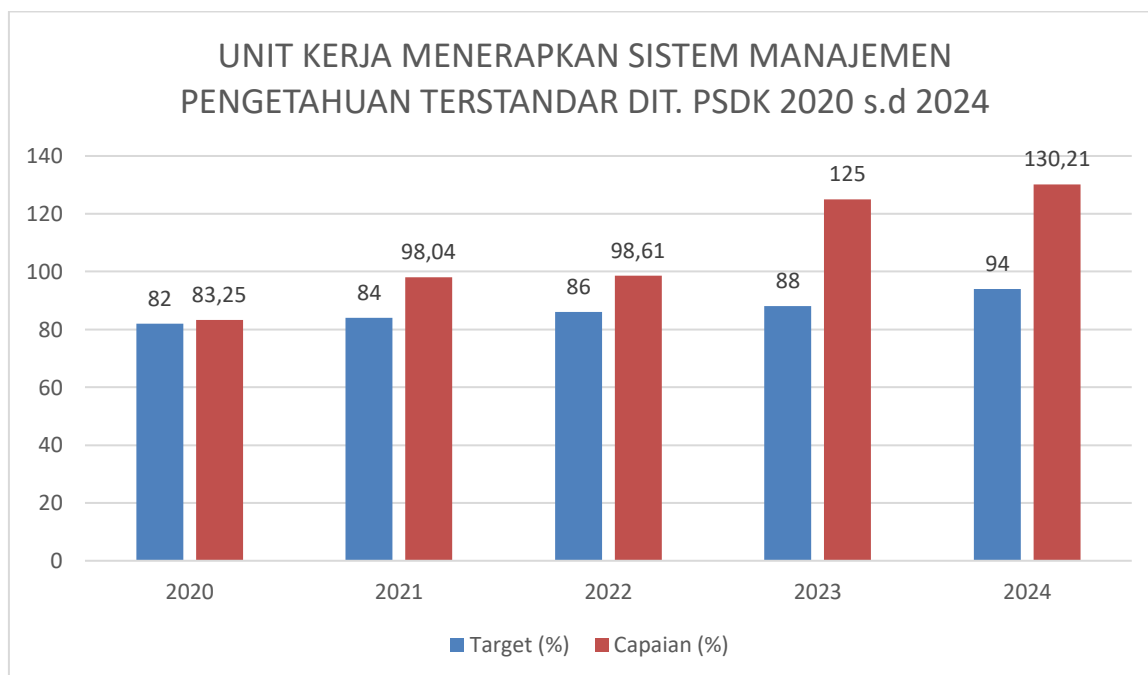
Pada Tahun 2024, penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandar salah satunya dipengaruhi oleh keaktifan pegawai lingkup Direktorat PSDK dalam hal penyampaian informasi kegiatan pada aplikasi colaboratif Office pada tautan

<https://portal.kkp.go.id>.

Tabel 30. Matriks perbandingan presentase unit kerja yang penerapan system manajemen pengetahuan yang tersandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target Tw IV	Capaian Tw I	Capaian Tw II	Capaian Tw III	Capaian Tw IV	Rata-Rata
1.	SETDITJEN	94%	115,48%	121,43%	133,33%	128,57%	124,70%
2.	DIT. POA	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
3.	DIT. PSDP	94%	133,33%	133,33%	133,33%	129,17%	132,29%
4.	DIT. PSDK	94%	133,33%	127,78%	127,78%	131,94%	130,21%
5.	DIT. PP	94%	133,33%	133,33%	127,78%	125,00%	129,86%

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, maka dapat disimpulkan Direktorat PSDK lebih tinggi dibandingkan Setditjen PSDKP, Direktorat PSDP dan Direktorat PP, sedangkan Direktorat PSDK lebih rendah dibandingkan Direktorat POA.



Gambar 25. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Presentase unit kerja yang penerapan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar lingkup Dit. PSDK Tahun 2020 s.d 2024

Apabila dibandingkan dengan capaian pada 2020 sampai dengan 2024, maka bisa terlihat adanya peningkatan capaian indikator kinerja. Hal ini dipengaruhi adanya kenaikan tingkat keaktifan pegawai lingkup Direktorat PSDK pada aplikasi kolaboratif Office pada tautan <https://portal.kkp.go.id>. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan pada periode tahun sebelumnya untuk melakukan peningkatan keaktifan

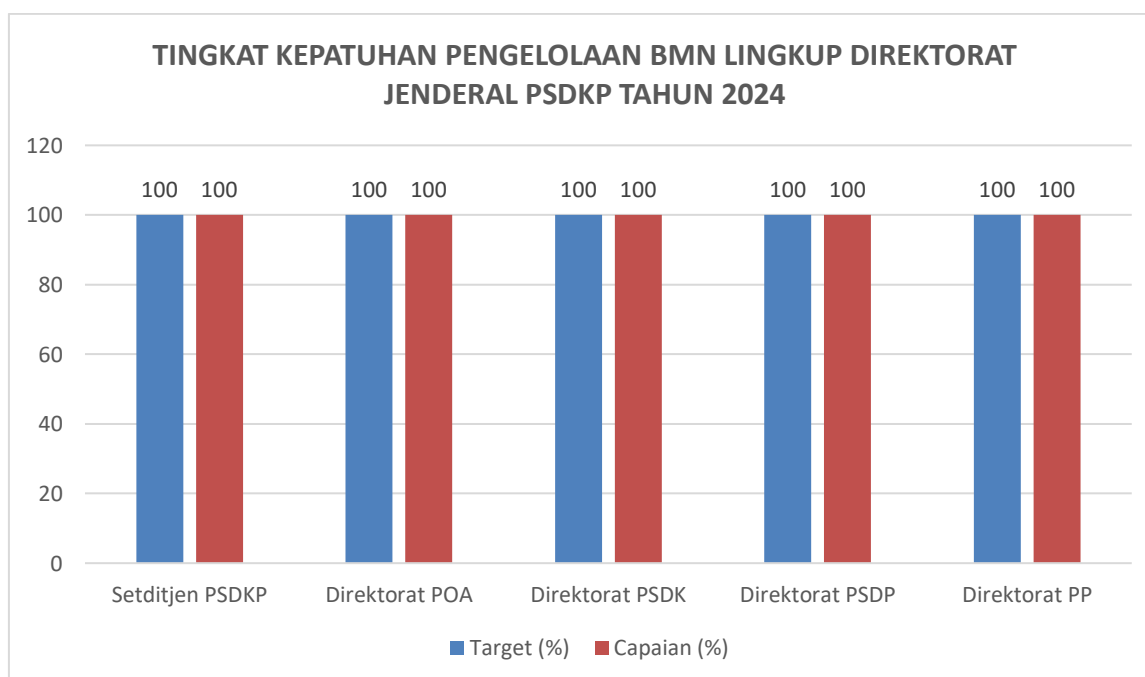
pegawai di aplikasi kolaboratif Office pada tautan <https://portal.kkp.go.id>. Terhadap ini, diharapkan seluruh pegawai lingkup Direktorat PSDK akan tetap menjaga keaktifan di kolaboratif Office pada tautan <https://portal.kkp.go.id>.

19. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengawasan SDK

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024;
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV Tahun 2024 baik penggunaan barang dan pengelola barang;
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017 – 2019;
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

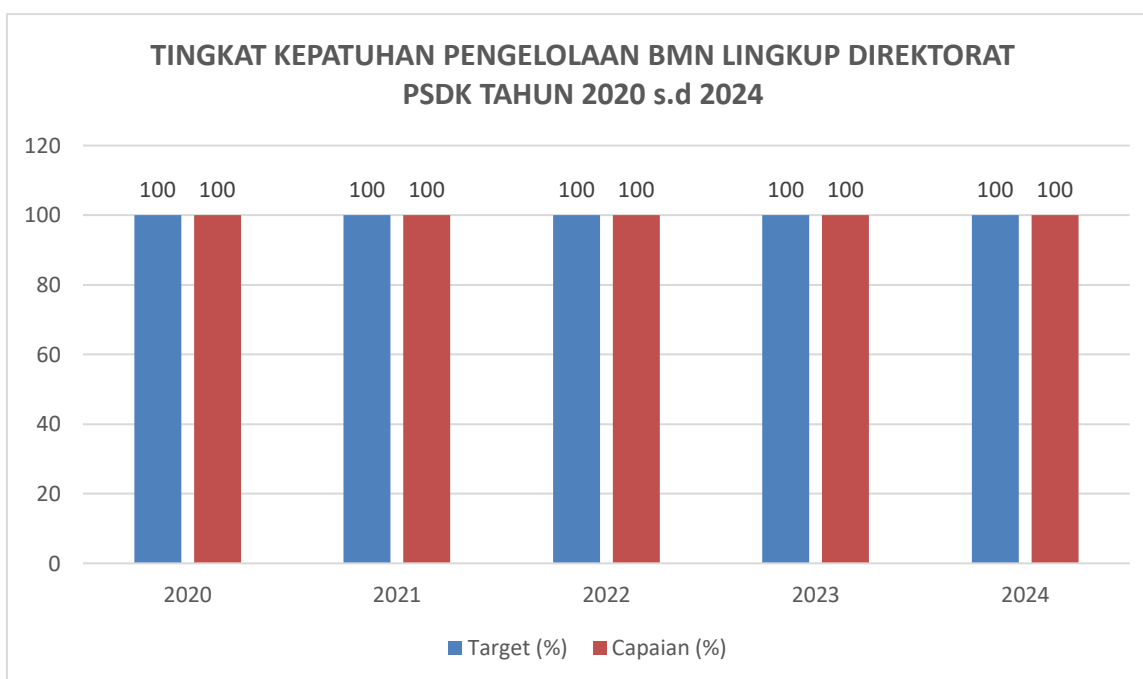
Adapun tingkat kepatuhan BMN lingkup Direktorat PSDK adalah 100%. Capaian 100% pada indikator kinerja ini diperoleh karena adanya kepatuhan terhadap pengelolaan BMN dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Terhadap indikator kinerja ini, Direktorat PSDK berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian.



Gambar 26. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan

BMN lingkup Direktorat Jenderal PSDK Tahun 2024

Capaian ini apabila dibandingkan dengan unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka diketahui bahwa seluruh unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP memiliki capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa adanya pengelolaan BMN oleh Direktorat Jenderal PSDKP yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Capaian tahun 2024 apabila dibandingkan selama periode tahun 2020 s.d 2024 selalu mencapai 100%. Capaian ini menandakan adanya konsistensi dalam pengelolaan BMN oleh Direktorat PSDK.



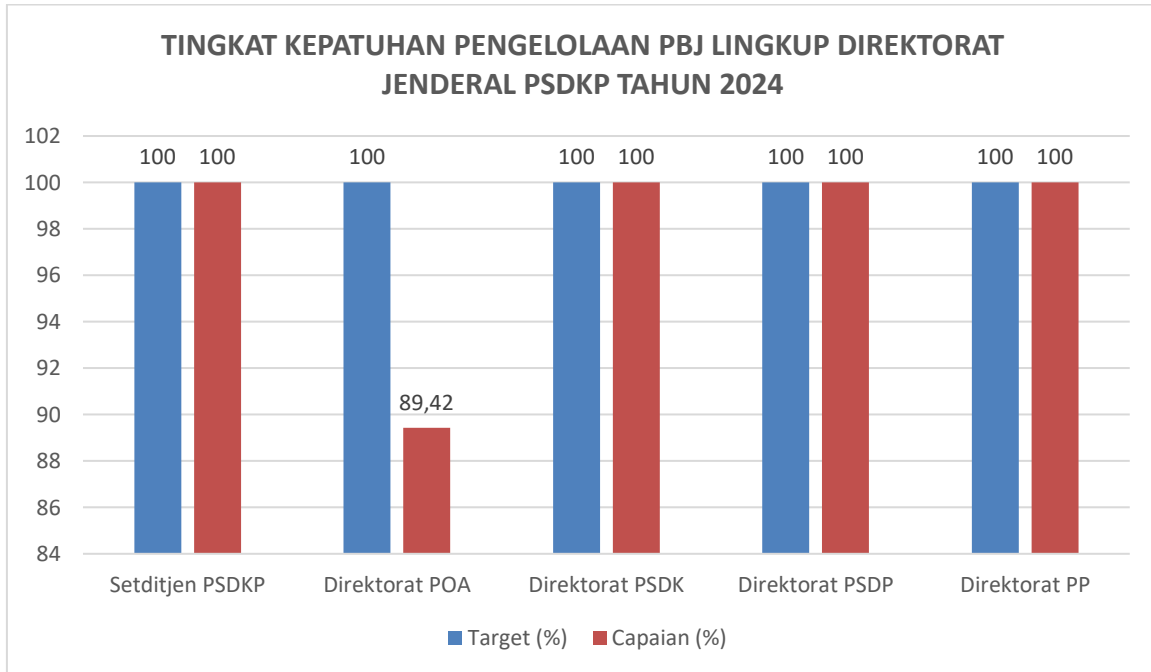
Gambar 27. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024

20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengawasan SDK

Pengukuran/penilaian dilaksanakan pada triwulan tahun 2024. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

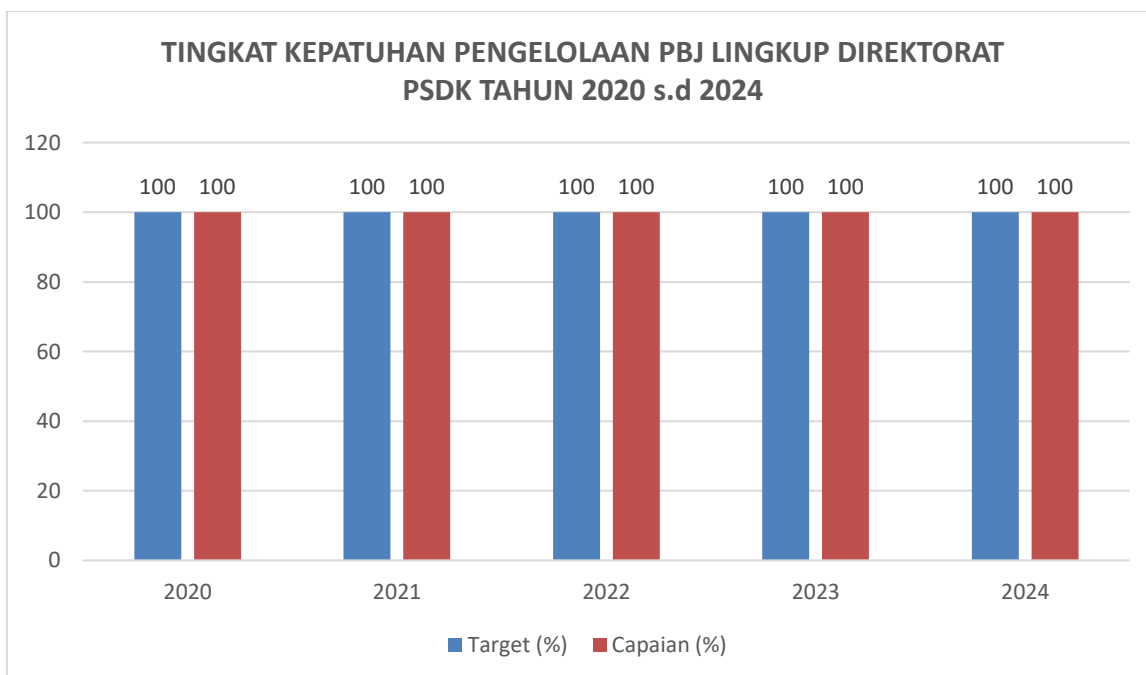
- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada tahun 2024 adalah 100%. Dalam hal ini pencapaian indikator kinerja ini, Direktorat PSDK kedepannya perlu mempertahankan kinerja dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa ini yaitu melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang transparan dan pelaporan di SIRUP secara tepat waktu.



**Gambar 28. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024**

Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka capaian ini sama dengan capaian Setditjen PSDKP, Direktorat PSDP dan Direktorat PP. Namun capaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Direktorat POA.



Gambar 29. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengawasan SDK Tahun 2020 s.d 2024

Capaian tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama periode tahun 2020 s.d 2024 selalu mencapai 100%. Capaian ini menandakan adanya konsistensi dalam pengelolaan PBJ oleh Direktorat PSDK.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2024 adalah Rp 16.701.293.000,- namun berubah menjadi Rp 12.701.293,- karena adanya *automatic adjustment*. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.693.380.969,- atau sebesar 99,94% apabila dibandingkan dengan alokasi awal. Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

Tabel 31. Matrik Realisasi Anggaran Direktorat PSDK Tahun 2024

No	Klasifikasi Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi	3,023,856,000	3,022,922,462
2	Normas, Stadar, Prosedur, dan Kriteria	800,000,000	799,486,784
3	Penanganan Perkara	1,830,000,000	1,828,300,435
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	378,300,000	377,801,771

No	Klasifikasi Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
5	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	262,830,000	262,194,571
6	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	100,000,000	99,902,004
7	Pemantauan Produk	4,257,169,000	4,254,908,779
8	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	193,000,000	192,922,576
9	Fasilitas dan Pemerintah Daerah	833,600,000	832,869,890
10	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1,022,538,000	1,022,071,697
Total		12,701,293,000	12,693,380,969

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya *automatic adjustment* yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran;
2. Adanya kebijakan unit kerja yang seringkali menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

D. Efisiensi

Direktorat PSDK berupaya melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan sumber daya anggaran dilakukan untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada periode tahun 2024. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana anggaran Kementerian negara/Lembaga, maka dilakukan pengukuran efisiensi kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis dimana dalam perhitungannya menggunakan perbandingan target output realisasi output, alokasi anggaran, realisasi kegiatan.

Pada tahun 2024 anggaran unit kerja eselon II Direktrat Jenderal PSDKP masih pada 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas nama Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai efisiensi kegiatan sebesar

4,26%. Nilai ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya masih cukup baik. Kedepannya dalam pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga tercapai sasaran kegiatan yang efektif dan efisien.

Tabel 32. Matriks Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024

No	SASARAN PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	JUMLAH OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan sumberdaya kelautan yang efektif	1	502	378,300,000	377,801,771	99.87%	0.53%
2	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengelolaan sumber daya kelautan Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	1	2	262,830,000	262,194,571	99.76%	0.24%
3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	9	37	10,011,025,000	10,005,520,464	99.95%	2.56%
4	Tata kelola pemerintah yang baik	10	2	1,656,660,000	1,641,359,849	99.08%	0.92%
JUMLAH		21	43	5,000	12,286,876,655	99.82%	4.26%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PSDK selama 1 tahun yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama.
2. Seluruh indikator kinerja yang memiliki target pada tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi sebesar 113,59 dan dikategorikan istimewa;
3. Kinerja realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah 99,94% dengan realisasi sebesar dari Rp12.693.380.969,- dari PAGU efektif sebesar Rp 12.701.293.000,-.

B. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan;
2. Terhadap pelaku usaha kelautan tidak patuh pada indikator kinerja utama perlu dilakukan pemantauan perkembangan rekomendasi yang telah diberikan;
3. Hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.